

SKRIPSI

**TRANSPARANSI MANAJEMEN DANA DESA MATTIRO ADE
KABUPATEN.PINRANG BERDASARKAN PSAK 101
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



2021

**TRANSPARANSI MANAJEMEN DANA DESA MATTIRO ADE
KABUPATEN.PINRANG BERDASARKAN PSAK 101
(ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)**



OLEH

**IRA MAYA SOPHA
NIM: 17.2800.038**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Terapan Akuntansi (S.Tr.Ak) pada Program Studi Akuntansi
Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

PAREPARE

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2021

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang Berdasarkan PSAK 101(Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Ira Maya Sopha

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.038

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam B. 1045/In.39.8/PP.00.9/7/2020

Disetujui oleh

Pembimbing Utama : Dr. Zainal Said, M.H. 

NIP : 19761118 200501 1 002

Pembimbing Pendamping : An Ras Try Astuti, M.E. 

NIP : 19901223 201503 2 004

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam




Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. 
NIP 19730129 200501 1 004

PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten.
Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)

Nama Mahasiswa : Ira Maya Sopha

Nomor Induk Mahasiswa : 17.2800.038

Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dasar penelatan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
B.1045/In.39.8/PP.00.9/7/2020

Tanggal Kelulusan : Senin, 29 November 2021/ 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Damirah, S.E.,M.M.

(Ketua)

Abdul Hamid, S.E., M.M

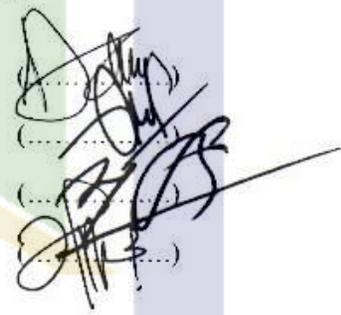
(Sekretaris)

Dr. Zainal Said, M.H.

(Anggota)

An Ras Try Astuti,M.E.

(Anggota)



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.
NIP. 19730129N200501 1 004

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah swt berkat taufik, hidayah dan rahmat-Nya. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad swt. beserta para keluarganya dan sahabatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Sebagai rasa syukur yang tidak hentinya maka penulis haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda tercinta Jawaria dan Ayahanda tercinta Suardi yang senantiasa memberi semangat, nasihat dan doanya Yulianti dan Nurhikma kakak yang selalu mendukung dan mendokan. Berkat merekalah sehingga penulis selalu semangat dan berusaha sebaik mungkin untuk menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak terutama pembimbing yaitu Bapak Dr. Zainal Said, M.H. selaku pembimbing utama dan Ibu An Ras Try Astuti, M.E. selaku pembimbing kedua atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

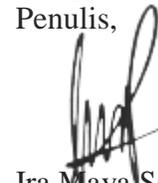
Penyusunan dan penulisan skripsi ini tidak akan terlaksana apabila tidak ada bantuan, kerjasama, serta dukungan pihak-pihak yang berbaik hati mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran secara sukarela membantu serta mendukung penulis sehingga penulisan skripsi ini dapat diselesaikan. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si selaku Rektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Bapak Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam dan Bapak Bahtiar, S.Ag.,M.A. sebagai Wakil Dekan FEBI.
3. Bapak Abdul Hamid, S.E.,M.M. sebagai penanggung jawab program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang telah memberikan bimbingan dan arahan.
4. Ibu Rusnaena, M.Ag selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan masukan dan nasihat.
5. Bapak/Ibu Dosen pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang selama ini telah mendidik penulis yang masing-masing memiliki kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.
6. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare.
7. Bapak, Ibu dan Jajaran staf administrasi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah begitu banyak membantu.
8. Ibu Dr. Muzdalifah Muhammadun, M.Ag yang selalu senantiasa memberikan bimbingan dan masukan.
9. Bapak Rustan Sali selaku Kepala Desa Mattiro Ade yang telah memberikan izin bagi penulis untuk melakukan penelitian dan para Staf Desa Mattiro Ade yang telah banyak membantu dalam proses penelitian.
10. Kepada pengurus desa dan tokoh masyarakat yang bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan banyak informasi yang sangat bermanfaat bagi penulis.

11. Kepada seluruh keluarga atas doa dan dukungan yang tak pernah putus untuk penulis
12. Kepada sahabat seperjuangan Eka Fatmalasai, Maudatul Hasana, Wasliha Amir, Muh.Riswan, khalik, Satria, Ummu Khatimah , Attahira, Nuraini yang telah memberikan banyak bantuan dan tak pernah mengeluh dikala penulis meminta bantuan dan selalu memberi semangat.
13. Kepada Rahmawati, S.Pd yang selalu yang tak hentinya memberikan wejangan dan semangat.
14. Kepada Maman Suryaman yang selalu membantu juga memberikan dukungan, doa dan semangat.
15. Semua teman-teman Senat Mahasiswa Institut memberikan dukungan dan doa.
16. Semua Crew Lpm Redline yang memberikan bantuan,dukungan dan doa.
17. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang memberi warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.
18. Seluruh pihak yang sangat berjasa dalam proses penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan skripsi ini.

Parepare, 22 Agustus 2021
Penulis,



Ira Maya Sopha
NIM: 17.2800.038

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Ira Maya Sopha
NIM : 17.2800.038
Tempat/Tgl. Lahir : Sempang Barat, 15 Februari 1999
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten.
Pinrang Berdasarkan PSAK 101(Analisis Akuntansi Syariah)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 22 Agustus 2021

Penyusun,


Ira Maya Sopha
NIM: 17.2800.003

ABSTRAK

Ira Maya Sopha. *Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten.Pinrang Berdasarkan PSAK 101(Analisis Akuntansi Syariah)* (dibimbing oleh Zainal Said dan An Ras Try Astuti).

Transparansi Manajemen Dana Desa dilihat dari bagaimana akses masyarakat kepada pemerintah desa keterbukaan dana desa dalam Merancang dan melaporkan Laporan keuangan. Namun keterbukaan itu masih belum mampu dilihat oleh masyarakat. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bentuk Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade dan Pelaksanaan Transparansi Manajemen Dana Desa Berdasarkan PSAK 101(Analisis Akuntansi Syariah).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dalam mengumpulkan data menggunakan pendekatan fenomenologi. Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu uji kredibilitas.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Berdasarkan PSAK 101 dapat dikatakan Transparansi karna melihat dari awal masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dana desa serta adanya pembangunan-pembangunan yang ada di desa seperti jalan, Puskesmas dan masih banyak pembangunan lainnya begitupun dengan bantu-bantuan yang diperuntukkan untuk masyarakat,serta adanya laporan pertanggung jawaban, pencatatan laporan keuangan sudah Sesuai dengan PSAK 101 akan tetapi pemerintah Desa Mattiro Ade belum tau akan hal ini karna mereka memiliki Buku pedoman tersendiri penyusunan laporan keuangan yang mengatur dari Kabupaten dinamakan PERBUK kemudian berkaca dari akuntansi syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pelaporan pertanggungjawabn yang baik dan adil.

Kata Kunci:*transparansi, manajemen, dana desa*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN TEORI	
A. Tinjauan Penelitian Relevan.....	7
B. Tinjauan Teoritis.....	9
1. Teori Transparansi.....	9
2. Teori Manajemen.....	16
3. Teori PSAK	23
4. Teori Akuntansi Syariah.....	25
C. Kerangka Konseptual.....	32

D. Kerangka Pikir	34
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	35
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	35
C. Fokus Penelitian.....	36
D. Jenis dan Sumber Data.....	36
E. Teknik Pengupulan dan Pengolahan Data	37
F. Uji Keabsahan Data	38
G. Teknik Analisis data	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Manajemen Dana Desa	42
B. Pelaksanaan Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten. Pinrang Baerdasarkan PSAK 101	54
BAB V PENUTUP	
A. Simpulan	72
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR TABEL

NO. Tabel	Judul Tabel	Halaman
2.1	Penduduk Desa Mattiro Ade Berdasarkan Pendidikan	45
2.2	Jumlah Siswa Menurut Pendidikan	45
2.3	Jumlah Pendapatan perbulan keluarga Desa Mattiro Ade	46
2.4	Jumlah pendpatan pengeluaran perbulan kepala keluarag Desa Mattiro Ade	47
2.5	Jumlah penduduk Desa Mattiro Ade berdasarkan mata pencaharian	48
2.6	Sarana Prasarana dan infrastuktur	49
2.7	Jumlah Pemeluk Agama Dan Tempat Ibadah	50
2.8	Jumlah Pemeluk Agama Dan Tempat Ibadah	50
2.9	Daftar Badan Permusyawaratan Desa Mattiro ade	52

DAFTAR GAMBAR

NO. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	34



DAFTAR LAMPIRAN

No.Lampiran	Judul Lampiran
1	Surat Pengantar dari Kampus
2	Surat Rekomendasi Penelitian
3	Surat Keterangan Telah Melaksanakan Penelitian
4	Pedoman Wawancara
5	Transkrip Wawancara
6	Laporan Pertanggungjawaban Tahun 2018,2019,2020,2021
7	Dokumentasi
8	Biodata Penulis

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Otonomi Daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹ Dengan disahkannya Undang-undang tersebut makin menjadikan peran pemerintah daerah menjadi semakin kuat dengan adanya otonomi daerah, daerah otonom berhak mengelola sendiri segala bentuk potensi daerahnya tanpa adanya intervensi dari pemerintah pusat, ini bertujuan untuk memakmurkan daerah otonom masing-masing.

Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.² Dalam memakmurkan masyarakat desa pemerintah desa tentunya akan menggunakan seluruh potensi desa untuk memakmurkan masyarakat desa.

Infrastruktur merupakan hal yang sangat penting dalam menunjang perekonomian desa, dengan adanya infrastruktur yang memadai secara tidak langsung akan menjadikan geliat perekonomian semakin tumbuh dan berkembang. Dalam membangun infrastruktur desa akan menggunakan Anggaran yang telah di rencanakan dan di musyawarahkan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (MUSRENBANG) sumber-sumber dana desa dapat di klasifikasikan menjadi beberapa menurut sumber di perolehnya dana tersebut. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa dalam segala aspeknya sesuai dengan kewenangan yang dimiliki,

¹ Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Bab I Pasal I

². Republik Indonesia, *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Bab I Pasal I.

UU Nomor 6 Tahun 2014 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk mengalokasikan dana desa. Keberadaan Undang-undang Dasar Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberikan peluang besar terhadap desa untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Pemberdayaan masyarakat berdasarkan kewenangannya.³

Undang-undang desa, juga mengatur dengan jelas mengenai pembangunan desa dan kawasan pedesaan, menjabarkan tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi local, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Penyelenggaraan pembangunan desa dilakukan dengan mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan dan mengutamakan kedamaian dan keadilan.

Agar pembangunan desa bisa berjalan dengan baik dan menghasilkan maka pembangunan desa harus terencana, terkordinasi, berbatas waktu, sesuai dengan kondisi khas masyarakat dan wilayah desa yang bersangkutan selain itu pelaksanaan pembangunan desa masyarakat adanya peran aktif masyarakat desa, lembaga-lembaga desa kecamatan dan kabupaten(atau lembaga supra desa) dan lain-lainnya. Dalam proses pembangunan desa pemantauan, pengawasan, evaluasi sangat diperlukan agar arah pembangunan desa tidak melenceng dari garis-garis yang ditentukan dalam perencanaan pembangunan desa itu sendiri.

Dana desa tersebut dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa. Kebijakan ini

³Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Jakarta.

sekaligus mengintegrasikan dan mengoptimalkan seluruh skema pengalokasian anggaran dari pemerintah kepada desa yang selama ini sudah ada.⁴

Dana desa berasal dari begitu banyak sumber, Anggaran Dana desa bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang di alokasikan setiap tahunnya yang besarnya di ukur berdasarkan banyak faktor seperti luas wilayah, kepadatan penduduk dan lainnya. Dana desa bersumber dari pemerintah Kabupaten dan kota yang sumber pendapatannya berasal dari pajak dan retribusi yang kemudian akan di alokasikan kemasing-masing sektor begitupun dengan desa. Pendapatan asli desa sebagian besar bersumber dari usaha-usaha mandiri yang dikelola oleh desa melalui badan usaha milik desa, serta sektor-sektor lainnya.

Rencana pembangunan jangka menengah desa adalah dokumen induk dari perencanaan pembangunan desa memuat visi dan misi arah kegiatan pembangunan didasarkan pada kondisi potensi dan permasalahan. Kebutuhan nyata Desa Mattiro Ade, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh dan berkembang di Desa Mattiro Ade. Rencana pembangunan jangka menengah sebagai rencana induk untuk melakukan kegiatan pembangunan desa, disusun oleh semua elemen masyarakat yang ada di Desa Mattiro Ade atau yang mewakilinya serta semua pihak yang berkepentingan.

Rencana pembangunan jangka menengah sebagai penjabaran dari visi dan misi desa, juga memuat kerangka ekonomi desa, arahan kebijakan keuangan desa, strategi pembangunan desa, kebijakan umum, dan disertai macam-macam program kegiatan dengan pendanaan yang bersifat indikatif.

Selain sebagai petunjuk dan arah kebijakan, ini juga digunakan untuk dasar penilaian kinerja perangkat Desa Mattiro Ade dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat selama masa jabatannya, juga digunakan sebagai tolak ukur keberhasilan perangkat Desa Mattiro Ade dalam laporan pemyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keuangan pertanggung

⁴ Kementrian Keuangan Republik Indonesia, *Buku Pintar Dana Desa* (Jakarta: 2008), h.1.

jawaban petinggi Desa Mattiro ade yang diserahkan kepada BPD maupun kepada masyarakat umum.

Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua juga merupakan desa dengan potensi sumber kekayaan yang sebagian besar diperoleh dari pertanian, sebagian besar alokasi dana desa diperuntukkan untuk pembangunan infrastruktur guna menunjang kualitas desa dan pertanian, pembangunan yang dilakukan seperti pembangunan jalaan dalam desa, irigasi pertanian serta jalan tani semua menggunakan alokasi dana desa dalam pembangunannya, akan tetapi yang menjadi permasalahan adalah tingkat transparansi yang masih jauh dari harapan masyarakat karna masing banyak sekali yang mengganjal bagi masyarakat seperti infrastruktur yang belum memadai juga beberapa bantuan yang belum merata⁵. sedangkan dana yang disampaikan oleh kepala desa sendiri luar biasa banyak.

Tahun Anggaran	Jumlah Anggaran
2018	Rp.747,264,000.00.
2019	RP. 867,912,000.00.
2020	Rp. 853,472,000,00.
2021	1,149,434.000.00.

Melihat dari dana yang disampaikan ada beberapa yang belum tersalurkan dan sama sekali tidak ada transparansi dari kantor desa itu sendiri.⁶

Manajemen Dana desa merupakan instrumen utama dalam melihat kecakapan desa dalam mengelola keuangannya, melalui transparansi manajmen dana desa yang baik dan terstruktur serta peruntutannya yang tepat sasaran diharapkan dapat berkontribusi besar dalam memajukan desa. Kenyataannya tranparansi yang kurang dari aparat desa menjadikan masyarakat bertanya mengenai keuangan desa disisi

⁵ Masyarakat Desa Mattiro ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus 2021)

lainnya tentu kita akan bertanya bagaimana desa menyajikan laporan keuangannya kepada badan pemeriksa laporan keuangan yang setiap tahunnya melakukan audit.

Standar laporan keuangan yang digunakan merupakan standar laporan keuangan konvensional sedangkan yang akan menjadi perbandingan adalah PSAK 101 yang memuat mengenai standar laporan keuangan harapannya bahwa laporan keuangan syariah ini bisa menjadi rujukan dalam menyusun laporan keuangan yang menjunjung tinggi nilai dan moral ekonomi syariah dan beberapa prinsip-prinsip akuntansi syariah. Dari uraian tersebut maka penulis merumuskan judul penelitian *Transparansi Manajemen Dana Desa Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)* yang kemudian akan peneliti teliti kedepannya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten. Pinrang?
2. Bagaimana pelaksanaan Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten. Pinrang Berdasarkan PSAK 101?

C. Tujuan Penelitian

Segala sesuatu yang ingin dilakukan tentunya mempunyai tujuan. Sama halnya dengan penelitian ini, juga mempunyai tujuan, adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten. Pinrang
2. Untuk mengetahui pelaksanaan transparansi Manajemen Dana desa Mattiro Ade Kabupaten. Pinrang berdasarkan PSAK 101.

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini

1. Kegunaan Teoretis

Kegunaan teoretis dari penelitian ini adalah hasil dari penelitian diharapkan bisa menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang akan mengkaji tentang transparansi Manajemen dana desa berdasarkan PSAK 101.

2. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil keputusan dalam permasalahan alokasi dana desa, sebagai bahan kajian bagi pihak yang terkait dengan kebijakan ini sehingga dapat mengoptimalkan keberhasilan kebijakan juga. Memberikan rekomendasi bagi pemerintahan daerah dalam manajemen alokasi dana desa berdasarkan PSAK101.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Pada penelusuran berbagai kepustakaan, penulis belum menemukan penelitian Transpaansi Manajemen Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PSAK 101, tetapi penulis akan memparkan hasil penelitian terdahulu yang menjadi pustaka acuan penelitian dalam menyusun penelitian ini.

Sherly Gresita Apriliani Penelitian dengan judul "*Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa*" Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengelolaan alokasi dana desa dari ketiga tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban di Desa Kedung Rejo Kecamatan Muncar telah memenuhi prosedur yang berlaku. Pengelolaan ADD di Desa Kedungrejo dapat dikatakan telah cukup baik dan sesuai dengan petunjuk teknis dari kabupaten.⁷

Perencanaan pengelolaan ADD diawali dengan mengadakan Musrenbangdes dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh-tokoh masyarakat. Pelaksanaan ADD di Desa Kedungrejo telah sesuai dengan proporsi yang diharuskan dalam petunjuk teknis, yaitu sebesar 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat desa. Hasil pembangunan sarana fisik dengan ADD tahun 2013 yaitu saluran-saluran air, plengsengan, pemasangan paving, dan renovasi kantor desa. Pertanggungjawaban penggunaan ADD di Desa Kedungrejo dilakukan oleh bendahara desa dengan merekap setiap kegiatan. Bentuk dari laporan pertanggungjawaban yang dibuat disesuaikan berdasarkan format dalam petunjuk teknis pengelolaan ADD dari kabupaten. Masalah yang muncul adalah

⁷. Sherly Gresita Apriliani. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013*. (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember, Tahun 2014).

kurangnya koordinasi antar anggota Tim Pelaksana ADD serta penyampaian laporan pertanggungjawaban yang terlambat. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji pengelolaan dana desa namun perbedaan dari penelitian ini yaitu pada penelitian Sherly Gresita Apriliani lebih fokus pada akuntabilitas konvensional sedangkan penelitian ini lebih fokus pada Transparansi manajemen dana desa berdasarkan PSAK 101.⁸

Anisah dengan judul "*Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Desa*", Fokus utama pada penelitian ini adalah melihat bagaimana pelaksanaan dana desa 2018 dalam upaya meningkatkan pembangunan desa perpektif ekonomi islam di desa bawang. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan Dana Desa di Desa Bawang dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan. Pemerintahan desa menerapkan sistem ekonomi islam dalam pemberdayaan yaitu kepemilikan, keseimbangan dan keadilan. Pada konsep kepemilikan, pemerintahan Desa Bawang memanfaatkan dan bukan menguasai secara mutlak Dana Desa melainkan digunakan secara bijak dan bertanggung jawab dalam upaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat.

Pada konsep keseimbangan, pada pengelolaan Dana Desa di desa Bawang telah terealisasi dilihat dari pembangunan dan pemberdayaan yang dilakukan. pada konsep keadilan Dana Desa dikelola secara adil dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, dapat dilihat dari pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai usulan dari perwakilan masyarakat desa. Adapun persamaa dari penelitian ini sama-sama mengkaji pengelolaan dana desa namun ada perbedaan dari penelitian ini yaitu pada penelitian Anisah lebih fokus pada pelaksanaan dana desa 2018 dalam⁹ upaya peningkatan pembangunan desa sedangkan penelitian ini lebih fokus pada Transparansi manajemen dana desa berdasarkan PSAK 101.

⁸. Sherly Gresita Apriliani. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013*.

⁹ Anisah, *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan Desadi Desa Bawang Kecamatan blado kabupaten batang tahun 2018 perspektif Ekonomi*

Arista WIdiyanti dengan judul”*Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa*” dengan hasil penelitian penatausahaan pengelolaan keuangan desa sumberjo sudah menggunakan format raperdes tentang APBDes, APBDes, proposal kegiatan, rancangan anggaran biaya (RAB) pernyataan pertanggung jawaban belanja, buku kas umum, buku bank, buku pembantu pajak, buku pembuatan kegiatan,laporan realisasi APBDes, laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes, laporan kekayaan milik desa dan laporan program sektoral dan program daerah masuk ke desa. Sementara teknis penatausahaan desa sumberjo dari sisi penerimaan, pengeluaran, pencatatan maupun pertanggungjawaban bendahara telah sesuai dengan permendagri nomor 113 tahun 2004. Maka Desa Sumberejo dalam proses Penatausahaan dikatakan *accountable*.¹⁰

Adapun persamaan dari penelitian ini sama-sama mengkaji tentang transparansi dana desa namun ada perbedaan penelitian ini pada penelitian arista widiyanti lebih fokus langsung pada akuntabilitas alokasi dana sedangkan pada penelitian lebih fokus pada transparansi manajemen dana desa berdasarkan PSAK 101.¹¹

B. Tinjauan Teoretis

1. Teori Transparansi

Menurut Mardiasmo Transparansi berarti keterbukaan(*openness*) pemerintahan dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.¹²

¹⁰ Arista Widiyanti, *Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa*, (Skripsi Jurusan Akuntansi Eakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri(UIN) Maluna Malik Ibrahim Malang), tahun 2017.

¹¹ *Islam*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Prodi Ekonomi Bisnis dan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan), tahun 2018.

¹² Arif Cahyadi, *Penerepan good governance dalam pelayanan public. Jurnal penelitian administrasi public* (vol.2 No.2 oktober 2016) penerapan good governance dalam pelayanan public PUBLIK (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good)

Menurut Krina Transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan proses pembukaan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai.

Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah informasi mengenai setiap aspek kebijakan pemerintahan yang dapat dijangkau publik, keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan *preferensi* publik.¹³

Menurut Sabamo Transparansi salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Perwujudan tata pemerintahan yang baik mensyaratkan adanya keterbukaan, keterlibatan, dan kemudahan akses bagi masyarakat terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan memberikan pengaruh untuk mewujudkan berbagai indikator lainnya.

Menurut Dwiyanto transparansi sebagai penyediaan informasi tentang pemerintahan bagi publik dan dijamin kemudahan di dalam memperoleh informasi-informasi yang akurat dan memadai.¹⁴

- a. Manfaat transparansi menurut Adrianto;
- 1) Mencegah korupsi.
 - 2) Lebih mudah mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan kebijakan.
 - 3) Meningkatkan akuntabilitas pemerintahan sehingga masyarakat akan mampu mengukur kinerja pemerintahan.
 - 4) Meningkatkan kepercayaan terhadap komitmen pemerintahan untuk memutuskan kebijakan tertentu.

¹³Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya) | Cahyadi | JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (untag-sby.ac.id) (di akses pada 24 Februari 2021).

¹⁴Juliana trandiling, *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah Terhadap Motivasi Mengajar Guru Di Kabupaten Keerom*. Jurnal kajian ekonomi dan keuangan daerah (vol.4 No.2 Agustus 2019).

5) Menguatkan *kohesi* sosial, karena kepercayaan publik terhadap pemerintahan akan terbentuk.

Standar akuntansi pemerintahan menjelaskan bahwa transparansi adalah memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintahan dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandat dari rakyat. Mengingat pemerintahan saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintahan harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan demikian transparansi menjadi instrumen penting yang dapat menyelamatkan uang pemegang kekuasaan mencerminkan sikap keterbukaan sesuai dengan firman Allah dalam surah An Nahl ayat 101.¹⁵

وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَّكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنزِلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan apabila kami letakkan suatu ayat di tempat ayat yang lain sebagai penggantinya padahal Allah lebih mengetahui apa yang diturunkan-Nya, mereka berkata: "Sesungguhnya kamu adalah orang yang mengada-adakan saja". bahkan kebanyakan mereka tiada Mengetahui.

¹⁵Andrianto,nico. *Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui e-Government*.malang Bayumedia Publishing,2007. h. 19-20

b. Indikator transparansi menurut Adrianto terdiri dari:

- 1) Adanya tidaknya kerangka kerja hukum bagi transparansi.
 - a) Adanya peraturan perundangan yang mengatur persoalan transparansi
 - b) Adanya kerangka kerja hukum yang memberi definisi yang jelas tentang peran dan tanggungjawab bagi semua aspek kunci dari manajemen fiskal.
 - c) Adanya basis legal untuk pajak.
 - d) Adanya basis legal untuk pertanggung jawaban belanja dan kekuasaan memungut pajak dari pemerintahan daerah.
 - e) Adanya pembagian peran dan tanggungjawab yang jelas dari masing-masing tingkatan pemerintahan.
- 2) Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran.
 - a) Adanya keterbukaan dalam kerangka kerja anggaran (proses penganggaran).
 - b) Diumumnya setiap kebijakan anggaran.
 - c) Dipublikasikannya hasil laporan anggaran (yang telah diaudit oleh lembaga yang berwenang).
 - d) Adanya dokumentasi anggaran yang baik mengandung beberapa indikasi fiskal.
 - e) Terbukanya informasi tentang pembelajaran aktual.
- 3) Adanya audit yang independen dan efektif.
 - a) Adanya lembaga audit yang independen dan efektif
 - b) Adanya kantor statistik yang akurasi datanya berkualitas.
 - c) Adanya sistem peringatan dini (*early warning system*) dalam kasus buruknya eksekusi atau leputusan anggaran.
- 4) Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.
 - a) Adanya keterbukaan informasi selama proses penyusunan anggaran.¹⁶

¹⁶ Andrianto, nico. *Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui e-Government*.h. 20.

b) Adanya kesempatan bagi masyarakat sipil untuk berpartisipasi dalam proses penggaran.¹⁷

c. Tahap pengelolaan keuangan daerah

1) Tahap Perencanaan

Tahap ini proses penyusunan APBD mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). RPJMD yang telah disusun sebelumnya, menjadi dasar bagi pemerintah daerah (pemda) menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Setelah RKPD ditetapkan, selanjutnya pemda dalam hal ini kepala daerah menyusun rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA). Berdasarkan KUA, pemda dan DPRD membahas rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disampaikan oleh kepala daerah. KUA dan PPAS yang telah dibahas dan disepakati bersama antara kepala daerah dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh kepala daerah dan pimpinan DPRD. Selanjutnya, atas dasar nota kesepakatan tersebut, kepala daerah menerbitkan pedoman penyusunan Rencana Kerja Anggaran-Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh tim anggaran pemda, dijadikan pedoman oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dalam menyusun rancangan peraturan daerah (perda) tentang APBD dan dokumen pendukung yang terdiri dari nota keuangan dan rancangan APBD. Rancangan perda tentang APBD yang telah disusun selanjutnya kepala daerah menyampaikannya kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama. Atas dasar persetujuan bersama tersebut, selanjutnya kepala daerah menyiapkan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD, kemudian diserahkan kepada

¹⁷Andrianto,nico. *Transparansi dan Akuntabilitas Public Melalui e-Government*. h.21

Gubernur dan Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Gubernur dan Menteri Dalam Negeri, rancangan perda tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD ditetapkan oleh kepala daerah menjadi perda tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD.¹⁸

2) Tahap Pelaksanaan

Setelah APBD ditetapkan sebagai perda, selanjutnya PPKD memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD (DPA-SKPD). Rancangan DPASKPD merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang telah disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap satuan kerja serta pendapatan yang diperkirakan. Rancangan DPA-SKPD yang telah disusun kepala SKPD, selanjutnya diserahkan kepada PPKD. Rancangan DPA-SKPD tersebut kemudian diverifikasi oleh tim anggaran pemda bersama-sama dengan kepala SKPD. Berdasarkan hasil verifikasi, PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah. DPA-SKPD digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

3) Tahap Penatausahaan

Pada tahap penatausahaan, dinyatakan bahwa pengguna anggaran/kuasa anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebhendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/atau pembantu bendahara

¹⁸ Irwan Taufiq Ritonga, *Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesi. (Desember 2016).196290-ID-mengukur-transparansi-pengelolaan-keuang.pdf (neliti.com).h.112 (Di akses 24 Februari 2021)

pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD. Dalam rangka manajemen kas daerah, PPKD menerbitkan Surat Pencairan Dana (SPD) dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.¹⁹

4) Tahap Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pada tahap ini, kepala SKPD selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana, yang berada dalam tanggungjawabnya. Penyelenggaraan akuntansi merupakan pencatatan/penatausahaan atas transaksi keuangan di lingkungan SKPD dan menyiapkan laporan keuangan sehubungan dengan pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan keuangan yang disiapkan terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, dan catatan atas laporan keuangan yang disampaikan kepada kepala daerah melalui PPKD. Kepala SKPD juga melampirkan surat pernyataan bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggungjawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. PPKD menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, ekuitas dana, termasuk transaksi pembiayaan dan perhitungannya. PPKD menyusun laporan keuangan pemda terdiri dari; laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan.

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan didasarkan pada laporan keuangan SKPD. Laporan keuangan disertai dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah. Laporan keuangan tersebut selanjutnya disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Kepala daerah menyampaikan rancangan perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

¹⁹ Irwan Taufiq Ritonga, *Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesi. h.113

APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.²⁰

5) Tahap Pengawasan

Tahap pengawasan keuangan daerah meliputi pembinaan dan pengawasan, pengendalian intern, dan pengendalian ekstern. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilakukan oleh pemerintah kepada pemda yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan. Sementara itu, pengawasan dilakukan oleh DPRD terhadap pelaksanaan perda tentang APBD. Tujuan pengawasan yang dilakukan DPRD adalah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perda tentang APBD.

2. Teori Manajemen

a. Manajemen

1) Pengertian Manajemen

manajemen berasal dari berbagai bahasa, yang pertama yaitu dari bahasa Prancis kuno yakni *management*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur lalu, dalam bahasa Italia, yaitu *meneggiare* yang memiliki arti mengendalikan, sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *to manage* yang artinya mengelola atau mengatur.²¹

Adapun definisi manajemen secara etimologis dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah aktivitas mengatur atau mengelola. Berikut ini juga disampaikan definisi manajemen menurut para ahli di antaranya sebagai berikut:

²⁰ Irwan Taufiq Ritonga, *Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesi. h. 113-114

a) George.R Terry

Manajemen adalah suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan,pengeorganisasian,pengarahan, dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sdm dan sumber-sumber lainnya.

b) John F.Mee

Manajemen adalah seni mencapai hasil yang maksimal dengan usaha minimal supaya tercapai kesejahteraan dan kebahagiaan maksimal,baik bagi pimpinan maupun para pekerja,serta memberikan pelayanan yang sebaiknya mungkin kepada masyarakat.

c) Marry Parker Follet

Manajemen adalah sebagai suatu seni.tiap-tiap pekerjaan bias diselesaikan dengan orang lain.

d) Jomes A.F stoner

Manajemen adalah proses perencanaan,pengorganisasian,dan penggunaan sumber daya organisasi yang lain, dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.²²

2) Unsur-unsur Manajemen

Terdapat unsur-unsur dalam manajemen,yaitu yang dikenal dengan 6m adalah:

a) *Man* (Manusia)

Dalam manajemen, faktor manusia adalah yang paling menentukan. Manusia yang membantu tujuan dan manusia pula yang melakukan proses untuk mencapai tujuan.tanpa ada manusia tidak ada prose kerja.

²²Roni Angger Aditama. *Pengantar manajeme*, (AEpublishing: Malang; 2020), h.1.

b) *Money* (Uang)

Uang merupakan salah satu unsur yang tidak dapat diabaikan. uang merupakan alat ukur dan alat pengukur nilai. Besar-kecilnya hasil kegiatan dapat diukur dari jumlah uang yang beredar (*cash flow*) dalam perusahaan. Oleh karena itu, uang merupakan alat (*tools*) yang penting untuk mencapai tujuan, karena segala sesuatu harus diperhitungkan secara rasional. Hal ini akan berhubungan dengan beberapa uang yang harus disediakan untuk membiayai gaji tenaga kerja, kebutuhan material atau bahan baku, pembelian dan perawatan peralatan yang dibutuhkan yang kesemuanya dalam rangka mencapai tujuan perusahaan.

c) *Materials* (Bahan-bahan)

Material terdiri dari bahan setengah jadi (*raw material*) dan bahan jadi. Dalam dunia usaha untuk mencapai hasil yang lebih baik, selalu manusia yang ahli dalam bidangnya, juga harus dapat dipisahkan.²³ Tanpa material tidak akan tercapai hasil yang dikehendaki. Penentuan jumlah material juga menentukan produktivitas dan efisiensi perusahaan dalam aktivitas operasionalnya.

d) *Machine* (Mesin)

Dalam kegiatan perusahaan, mesin sangat diperlukan, penggunaan mesin akan membawa kemudahan atau menghasilkan keuntungan yang lebih besar, serta menciptakan efisiensi kerja. Produktivitas akan semakin tinggi dengan kehadiran teknologi canggih sebagai pengganti dari tenaga manusia yang terbatas dan memiliki biaya relatif besar.²⁴

e) *Methods* (Metode)

Dalam pelaksanaan kerja, diperlukan metode-metode kerja atau sistem-sistem kerja. Suatu tata cara kerja yang baik akan memperlancar jalannya pekerjaan. Sebuah metode atau sistem kerja akan sangat

²³Roni Angger Aditama. *Pengantar manajemen*, h.2.

²⁴Roni Angger Aditama. *Pengantar manajemen*, h.3.

dibutuhkan dalam menjalankan seluruh aktivitas operasional perusahaan. Metode atau sistem ini bertindak sebagai pemandu sikap dan tingkah laku, serta tata cara dalam proses pekerjaan, sehingga diharapkan dalam pelaksanaannya sesuai dengan alur dan ketentuan yang berlaku di perusahaan tersebut. Akan tetapi, hal yang perlu diingatkan meskipun metode atau sistem yang dibangun sudah cukup baik, sedangkan orang yang melaksanakannya tidak mengerti atau tidak mempunyai pengalaman, maka hasilnya tentu tidak akan memuaskan.²⁵

f) *Market* (Pasar)

Dalam dunia bisnis, Pasar memegang posisi yang cukup penting dan strategis. Pasar sebagai ujung tombak dalam aktivitas bisnis, karena di sanalah bisnis bias mendapatkan keuntungan. Bisnis selalu mengedepankan kostumer oriented atau maker oriented, di mana sebagai pelaku bisnis apabila ingin berkembang dan maju ,maka harus mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan kegiatan pasar. Perusahaan yang mampu memenuhi kebutuhan dan keinginan pasar akan tetap bertahan dan mampu bersaing dalam lingkungan persaingan yang kompetitif.

3) Fungsi Manajemen

Sebuah perusahaan dibangun dengan suatu tujuan yang hendak dicapai oleh seluruh anggota organisasi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tujuan tersebut di antara meliputi :

- a) Kelangsungan hidup usaha
- b) Keuntungan yang maksimal
- c) Perumbuhan yang berkelanjutan
- d) Penyediaan lapangan kerja
- e) Investasi dan pengembangan usaha, dan sebagainya,

²⁵Roni Angger Aditama. *Pengantar manajemen*,h. 4-6

Tujuan yang disampaikan di atas dapat dilihat dalam berbagai sudut pandangan semisal keuntungan maksimal, perusahaan sebagai organisasi yang mengharapkan profit akan membandingkan anantara pengembalian (return) investasi dengan besaran nilai investasi yang diberikan, dengan harapan bisa segera kembali dan memiliki nilai pengembalian yang lebih besar.

Sedangkan tujuan perusahaan yang berkaitan dengan tersedianya lapangan pekerjaan adalah sebagai upaya sosial yang sebagai wujud kepedulian²⁶ perusahaan. Kesemuanya dari tujuan tersebut akan tercapai apabila perusahaan mampu secara optimal memanfaatkan semua sumber daya yang dimilikinya.

Para ahli, dalam manajemen dikenal dengan fungsi manajemen. Fungsi dalam manajemen dikenal dengan *planning, organizing, actuating*, dan *controlling* (POAC).

(1). *Planning*(perencanaan)

Perencanaan adalah proses yang mendefinisikan tujuan dari organisasi, membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan dari organisasi, serta mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Dalam mengawali setiap aktivitas pada sebuah pekerjaan dalam organisasi bisnis, dibutuhkan fungsi perencanaan sebagai tahapan pertama untuk menentukan arah dan tujuan organisasi bisnis kedepan. Perencanaan memiliki beberapa manfaat, yaitu :

(a). *Protective Benefit*

Perencanaan disusun dimaksudkan untuk menekan atau meminimalisir kemungkinan resiko kesalahan dan kegagalan sehingga dari tujuan organisasi bisnis dapat tercapai.

(b). *Positive Benefit*

²⁶Roni Angger Aditama. *Pengantar manajemen* , h. 10-13

Perencanaan disusun dimaksudkan untuk memastikan bahwa arah dan tujuan organisasi bisnis yang sudah ditentukan dalam VISI dan MISI perusahaan dapat tercapai sesuai dengan yang diharapkan.

(2). *Organizing* (pengorganisasian)

Pengeorganisasian didefinisikan sebagai proses kegiatan penyusunan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk desain organisasi atau struktural organisasi sesuai dengan tujuan perusahaan yang tertuang di dalam visi dsan misi perusahaan, sumber daya organisasi, dan lingkungan bisnis perusahaan tersebut.²⁷

Yang di atas terbagi menjadi 3 (tiga) macam, antara lain:

- (a) Sumber daya manusia (SDM), meliputi tenaga kerja/karyawan, baik dari level operasional sampai dengan manajerial.
- (b) Sumber daya fisik, meliputi tanah, mesin, gedung, fasilitas perusahaan, dsb.
- (c) Sumber daya organisasional, meliputi *brand/merk* prosedur dan kebijakan (SOP/IK), sistem informasi dan teknologi, dan sebagainya.

(3). *Actuating* (pelaksanaan)

suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan manajerial dan usaha-usaha organisasi.

sebuah pelaksanaan adalah proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang bentuk rencana, konsep, ide, dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik pada level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan, yaitu visi dan misi organisasi.²⁸

²⁷Roni Angger Aditama. *Pengantar manajemen* , h.13-14

²⁸Roni Angger Aditama. *Pengantar manajemen*, h.16

Professor Thomas V. Bonoma menyampaikan bahwa dalam menjalankan rencana yang sudah sebelumnya disusun sedemikian rupa terkadang dalam implementasi bisa jadi terdapat berbagai macam kemungkinan-kemungkinan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan atau bahkan berhasil sukses sebagaimana yang dicita-citakan. Berbagai macam kemungkinan itu kemudian terangkum sebagai berikut.

Agar lebih jelas mengenai berbagai kemungkinan yang terjadi antara rencana berbagai kemungkinan yang terjadi antara rencana dengan implementasi, berikut ini adalah penjelasannya:

- (a) *Success*, merupakan hasil yang paling diinginkan oleh perusahaan ini terjadi pada saat perusahaan mampu melakukan perencanaan sekaligus implementasi dari rencana dengan baik pula.
- (b) *Roulette*, situasi di mana strategi yang diformulasikan oleh perusahaan sesungguhnya kurang baik, tetapi hasil yang didapat tidaklah terlalu mengecewakan, karena pihak manajemen perusahaan ternyata sangat mampu mengimplementasikan strategi tersebut dengan baik yang disertai dengan berbagai penyesuaian.
- (c) *Trouble*, situasi di mana strategi perusahaan sebenarnya telah diformulasikan dengan sangat baik. Namun, strategi tersebut kacau dan tidak optimal karena manajemen perusahaan tidak mengimplementasikan dengan baik.²⁹
- (d) *Failure*, merupakan hasil yang terburuk dan *planing* tidak diinginkan oleh manajemen perusahaan. Hal ini terjadi karena strategi perusahaan memang diformulasikan dengan baik dan kurang memuaskan. Yang lebih buruknya lagi, implementasinya ternyata dilakukan secara kurang baik pula.

²⁹Roni Angger Aditama. *Pengantar manajemen*, h.17-18

(4) *Controlling* (control/Evaluasi)

alah satu fungsi manajemen untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Dalam hal ini guna memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan dijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat. Selain itu, fungsi manajemen ini akan bisa memonitor kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga bisa segera terdeteksi lebih dini untuk dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan.

Pada dasarnya pengawasan merupakan tindak lanjut dari fungsi-fungsi sebelumnya bahwa dalam serangkaian fungsi atau aktivitas dalam sebuah organisasi dibutuhkan kontrol atau evaluasi guna memastikan bahwa semua dijalankan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.³⁰

3. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101

Pernyataan ini bertujuan untuk mengatur penyajian dan pengungkapan laporan keuangan untuk tujuan umum (general purpose Financial Statements) untuk entitas syariah yang selanjutnya disebut laporan keuangan, agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan entitas syariah lain. Pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi dan peristiwa tertentu diatur dalam pernyataan standar akuntansi keuangan (PSAK) terkait.

a. Ruang Lingkup

Pernyataan ini diterapkan dalam penyajian laporan keuangan entitas syariah untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan.³¹

³⁰Roni Angger Aditama. *Pengantar manajemen*, h.19-20

³¹Ikatan akuntansi Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, dewan Standar Akuntansi Keuangan, 2007. h. 1

Entitas syariah yang dimaksud di PSAk ini adalah entitas yang melaksanakan transaksi syariah sebagai kegiatan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang dinyatakan dalam anggaran dasarnya.

Laporan keuangan untuk tujuan umum adalah laporan keuangan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar penggunaan laporan. Laporan keuangan untuk tujuan umum termasuk juga laporan keuangan yang disajikan terpisah atau yang disajikan dalam dokumentasi publik lainnya seperti laporan tahunan atau prospektif. Pernyataan ini berlaku pula untuk laporan keuangan konsolidasian.

Pernyataan ini bukan merupakan pengaturan penyajian laporan keuangan sesuai permintaan khusus (*statutory*) seperti pemerintahan, Lembaga pengawasan independen, Bank sentral, dan sebagainya.

Pernyataan ini menggunakan terminologi yang cocok bagi entitas syariah yang berorientasi profit, termasuk entitas bisnis sektor publik, entitas nirlaba syariah, entitas sektor publik, pemerintahan dan entitas syariah lainnya yang akan menerapkan standar ini mungkin perlu melakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap deskripsi beberapa pos yang terdapat dalam laporan keuangan dan istilah laporan keuangan itu sendiri serta dapat pula menyajikan komponen-komponen tambahan dalam laporan keuangannya.

Entitas syariah seperti reksadana dan entitas yang modalnya tidak terbagi atas saham, Misalnya koperasi, memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap penyajian dalam laporan keuangannya.³²

1) Dasar laporan keuangan PSAK 101

- a) Laporan realisasi anggaran menyajikan realisasi atas anggaran pendapatan dan biaya (APB) dan perbandingan antara realisasi dan anggaran pada satu periode pelaporan

³²Ikatan Akuntansi Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, h.2

- b) Laporan aktivitas menyajikan ikhtisar sumber berupa pendapatan dan alokasi berupa biaya yang dikelola oleh PTM dalam satu periode pelaporan.
- c) Laporan neraca menggambarkan posisi keuangan PTM mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
- d) Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas pokok (Rutin), aktivitas Non pokok (Non rutin) dan aktivitas investasi dengan menggunakan metode langsung.
- e) Catatan atas laporan keuangan meliputi pejelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi Anggaran, Neraca dan Laporan Arus kas.

2) Identitas laporan keuangan

Laporan keuangan diidentifikasi dan dibedakan secara jelas dari informasi lain dalam dokumentasi publikasi yang sama.³³ Laporan keuangan sering disajikan sebagai bagian dari suatu dokumentasi seperti laporan tahunan atau *prospectus*. PSAK hanya berlaku untuk laporan keuangan dan tidak berlaku untuk informasi lain yang disajikan dalam laporan tahunan atau dokumen lainnya oleh karena itu sangat penting bagi pengguna untuk mampu membedakan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan PSAK dari informasi lain yang juga bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan tetapi tidak perlu disajikan sesuai dengan PSAK.

3) Periode pelaporan

Laporan keuangan setidaknya disajikan secara tahunan. Apabila tahunan buku entitas syariah berubah dan laporan keuangan tahunan disajikan untuk periode yang lebih panjang atau pendek daripada periode satu tahun, maka sebagian tambahan terhadap periode cukup laporan keuangan, entitas syariah harus mengungkapkan:

- a) Alasan penggunaan periode pelaporan selain periode suatu tahunan dan,

³³ Ikatan Akuntansi Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*, h. 11

b)Fakta bahwa jumlah kompratif dalam laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, laporan sumber dan penggunaan dana zakat, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan, serta catatan yang terkait tidak dapat diperbandingkan.

4. Akuntansi Syariah

Secara sederhana pengertian akuntansi syariah dapat dijelaskan melalui akar kata yang dimilikinya yaitu akuntansi dan syariah . Definisi bebas akuntansi adalah identifikasi transaksi yang kemudian diikuti dengan kegiatan pencatatan, penggolongan, serta pengihtisaran transaksi tersebut sehingga menghasilkan laporan keuangan yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan. Sedangkan definisi bebas dari syariah adalah aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt untuk dipatuhi oleh manusia dalam menjalani segala aktivitas hidupnya di dunia.³⁴

Akuntansi dalam bahasa arabnya disebut’’muhasabah’’ yang berasal dari kata hasaba, hasiba, muhasabah, atau wazan yang lain adalah hasabah, hasban, menghisab, yaitu menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata “hisab” banyak ditemukan dalam Al-Qur’an dengan pengertian yang hamper sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka,seperti Firman Allah swt:

QS.Al-Isra:17/12

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۖ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۖ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلُّ شَيْءٍ فَصَلْنَاهُ تَفْصِيلًا

Terjemahnya:

“Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. dan segala sesuatu Telah kami terangkan dengan jelas”.³⁵

³⁴Arfan ikhsan,*Akuntansi Syariah*.(Madenatera. 2017).h.13

³⁵. Kementrian Agama RI. *Al-Qur’an Transliterasi dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Fadhilah Keutamaan Amal*. (Bandung: SYGMA,2012) h. 283.

QS.Al-Thalaq :65/8

وَكَايْنٍ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَدَّيْنَاهَا
عَذَابًا نُّكْرًا

Terjemahnya :

“Dan Berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka dan rasul-rasul-Nya, Maka kami hisab penduduk negeri itu dengan hisab yang keras, dan kami azab mereka dengan azab yang mengerikan”.³⁶

QS.Al-Insiquah: 84/8

فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا

Terjemahnya :

“Maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah”.³⁷

Kata hisab dalam ayat-ayat tersebut menunjukan pada bilangan atau perhitungan yang ketat, teliti, akurat, dan *accountable*. Oleh karna itu,akuntansi adalah mengetahui sesuatu dalam keadaan cukup, tidak kurang dan thidak pula lebih. Berdasarkan pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi syariah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, dan pelaporan melalui dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi) *gharar* (penipuan), barang yang haram, dan membayangkan jadi, akuntansi syariah dapat diartikan sebagai proses akuntansi atas transaksi-transaksi sesuai aturan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. Informasi yang disajikan oleh akuntansi syariah untuk pengguna laporan lebih luas tidak hanya data finansial tetapi juga mencakup aktivitas perusahaan yang berjalan sesuai dengan

³⁶ . Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Fadhilah Keutamaan Amal*. h. 559.

³⁷ . Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Fadhilah Keutamaan Amal*. h. 589

syariah serta memiliki tujuan sosial yang tidak terhindarkan dalam Islam, misalnya adanya kewajiban membayar zakat.

a. Prinsip-prinsip Akuntansi Syariah

1) Pertanggungjawaban(*Accountability*)

Prinsip pertanggung jawaban (*accountability*), merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan masyarakat muslim. pertanggungjawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Bagi kaum muslim ,persoalan amanah merupakan hasil transaksi manusia dengan sang khalik mulai dari alam kandungan. Manusia dibebani oleh allah swt.untuk³⁸ menjalankan fungsi kekhalifaan di muka bumi. Inti kekhalifahan adalah menjalankan atau menunaikan amanah. Banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang proses pertanggungjawaban manusia sebagai pelaku amanah Allah dimuka bumi. Implikasi dalam bisbis dann akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus melakukan pertanggungjawaban yang telah diamanatkan dan di perbuat kepada pihak-pihak yang terkait.

2) Prinsip keadilan

Menurut Al-Qur'an surat Al-Baqarah;282 terkandung prinsip keadilan yang merupakan nilai penting dalam etika kehidupan social dan bisnis, dan nilai inheren yang melekat dalam fitrah manusia. Hal ini berarti bahwa manusia itu pada dasarnya memiliki kapasitas dan energi untuk berbuat adil dalam setiap aspel kehidupan. Pada konteksnya akuntansi, menegaskan kata adil dalam ayat 282 surat Al-Baqarah, dilakukan oleh perusahaan oleh perusahaan harus dicatat dengan benar. Misalnya, bila nilai transaksi adalah sebesar 265 juta, maka akuntan (perusahaan) harus mencatat dengan jumlah yang sama dan sesuai dengan nominal transaksi. Secara sederhana dapat berarti bahwa setiap transaksi yang dengan kata lain tidak ada *window dressing* dalam praktis akuntansi perusahaan.

³⁸Arfan ikhsan,*Akuntansi Syariah*. h.14-15

Surah Al-Baqarah : 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ
 كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ
 الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ
 سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيَمْلِكْ وَلِيَّهُ بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah [tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur..

3) Prinsip kebenaran

Prinsip ini sebenarnya tidak dapat dilepaskan dengan prinsip keadilan. sebagai contoh, dalam akuntansi kita selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pengukuran laporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandaskan pada nilai kebenaran. Kebenaran ini akan dapat menciptakan nilai keadilan dalam mengakui, mengatur, dan melaporkan transaksi-transaksi dalam ekonomi. Maka, pengembangan akuntansi Islam, nilai-nilai kebenaran, kejujurn dan keadilan harus diaktualisasikan dalam praktik akuntansi. Secara garis besar, bagaimana nilai-nilai kebenaran membentuk akuntansi syariah, dapat diterangkan.³⁹

³⁹Arfan ikhsan, *Akuntansi Syariah*. h.16

Berdasarkan pada nash-nash Al-Qur'an yang telah dijelaskan tentang konsep akuntansi dan prinsip-prinsip akuntansi syariah, maka dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri akuntansi syariah sebagai berikut:

- a) Dilaporkan secara benar
 - b) Cepat dalam pelaporannya
 - c) Dibuat oleh ahlinya (akuntan)
 - d) Terarah, jelas, tegas dan informative
 - e) Memuat informasi yang menyeluruh
 - f) Informasi ditujukan kepada semua pihak yang terlibat dan membutuhkan
 - g) Terperinci dan teliti
 - h) Tidak terjadi manipulasi
 - i) Dilakukan secara kontinu (tidak lalai)
- b. Nilai-nilai Akuntansi Syariah

Akuntansi modern tidak mungkin bebas dari nilai dan kepentingannya apapun karena dalam proses penciptaan akuntansi melibatkan manusia yang memiliki kepribadian dan penuh dengan kepentingan. Nilai utama yang melekat dalam diri akuntansi modern adalah nilai *egoistic* dan materialistis. Bila informasi yang dihasilkan oleh akuntansi modern adalah nilai *egoistic* dikonsumsi oleh para pengguna, maka dapat dipastikan bahwa pengguna tadi akan berfikir dan mengambil keputusan yang egoistik pula. Bagi kalangan masyarakat muslim, tuhan menjadi tujuan akhir dan menjadi tujuan puncak kehidupan manusia. Akuntansi syariah, hadir untuk melakukan dekonstruksi terhadap akuntansi modern.⁴⁰ Melalui epistemologi berpasangan, akuntansi syariah berusaha memberikan kontribusi bagi akuntansi sebagai instrument bisnis sekaligus menunjang penemuan hakikat diri dan tujuan hidup manusia.

Pada versi pertama, akuntansi syariah memformulasikan tujuan dasar laporan keuangannya untuk memberikan informasi dan media untuk

⁴⁰Arfan ikhsan, *Akuntansi Syariah*. h.17

akuntabilitas. Informasi yang terdapat dalam akuntansi syariah merupakan informasi materi seperti aktiva mental dan aktiva spiritual. Contoh aktiva spiritual adalah ketakwaan, sementara aktiva mental adalah ahlak yang baik dari semua jajaran manajemen dan seluruh karyawan. Sebagai media untuk akuntabilitas, akuntansi syariah memiliki dua macam akuntabilitas horizontal berkaitan dengan akuntabilitas kepada manusia dan alam, sementara akuntabilitas vertikal dalam akuntabilitas kepada sang pencipta alam semesta.⁴¹

Pada versi kedua, tujuan dasar laporan keuangan syariah adalah memberikan informasi, memberikan rasa damai, kasih dan sayang, serta menstimulasi bangkitnya kesadaran ketuhanan.

Ketiga tujuan ini, merefleksikan secara berturut-turut dunia materi, mental, dan spiritual. Tujuan pertama secara khusus hanya menginformasikan dunia materi baik yang bersifat keuangan maupun non keuangan. Tujuan kedua membutuhkan bentuk laporan yang secara khusus menyajikan dunia mental yakni rasa damai, kasih dan sayang. Selanjutnya tujuan ketiga, disajikan dalam wadah laporan yang khusus menyajikan informasi kebangkitan kesadaran ketuhanan.

Kinerja manajemen syariah memiliki tiga bentuk realistik yaitu fisik (materi) dengan perspektif kesalahan keuangan yang memiliki indikator seperti nilai tambah syariah (profit), dan zakat. Realitas berikutnya adalah psikis (mental) dengan perspektif kesalahan mental dan sosial, yang memiliki indikator seperti damai, kasih sayang, adil, empat, dan peduli. Sementara realitas terakhir adalah spiritual dengan perspektif kesalahan spiritual, yang memiliki indikator seperti ikhsan, cinta, dan takwa.

Akuntansi syariah dibangun dengan mengambil inspirasi dari syariah islam. Secara ontologis, akuntansi syariah memahami realitas dalam pengertian

⁴¹Arfan ikhsan, *Akuntansi Syariah*. h.18

yang menjemuk.sedangkan secara epistemologi,akuntansi syariah dibangun berduka fisik dengan dunia non fisik.

C. Tinjauan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Transparansi Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan PSAK 101” sebagai alur pikir dalam penelitian ini maka peneliti akan menjelaskan mengenai pengertian dari judul yang peneliti angkat agar tidak terjadi kesalah pahaman dan memudahkan pemahaman terhadap isi pembahasan oleh karena itu dibawah akan di uraikan tentang pembahasan makna judul tersebut.

a. Transparansi

Pengelolaan Keuangan Desa Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluasluasnya tentang keuangan daerah.⁴² Sparansi Pengelolaan Keuangan Desa Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan, dalam hal ini yaitu masyarakat luas sehingga prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

b. Manajemen

Manajemen merupakan suatu proses khas terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.⁴³

⁴²Hanifa, Suci Indah, *Akuntansi dan Transparansi Pertanggung Jawaban Anggaran belanja pendapatan desa*, Jurnal ilmu dan riset akuntansi.vol.4, 2015. h. 7.

⁴³Sucahyowati,Hari. *Manajemen Sebuah Pengantar*.2017. h. 5

c. Dana Desa

Adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang di transfer melalui APBD Kabupaten/Kota dan di prioritaskan untuk pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ⁴⁴

d. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 101

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan 101: Penyajian Laporan Keuangan Syariah (selanjutnya disebut PSAK 101) menetapkan dasar penyajian laporan keuangan bertujuan umum untuk entitas syariah. Pernyataan ini mengatur persyaratan penyajian laporan keuangan, struktur laporan keuangan, dan persyaratan minimal isi laporan keuangan atas transaksi syariah.

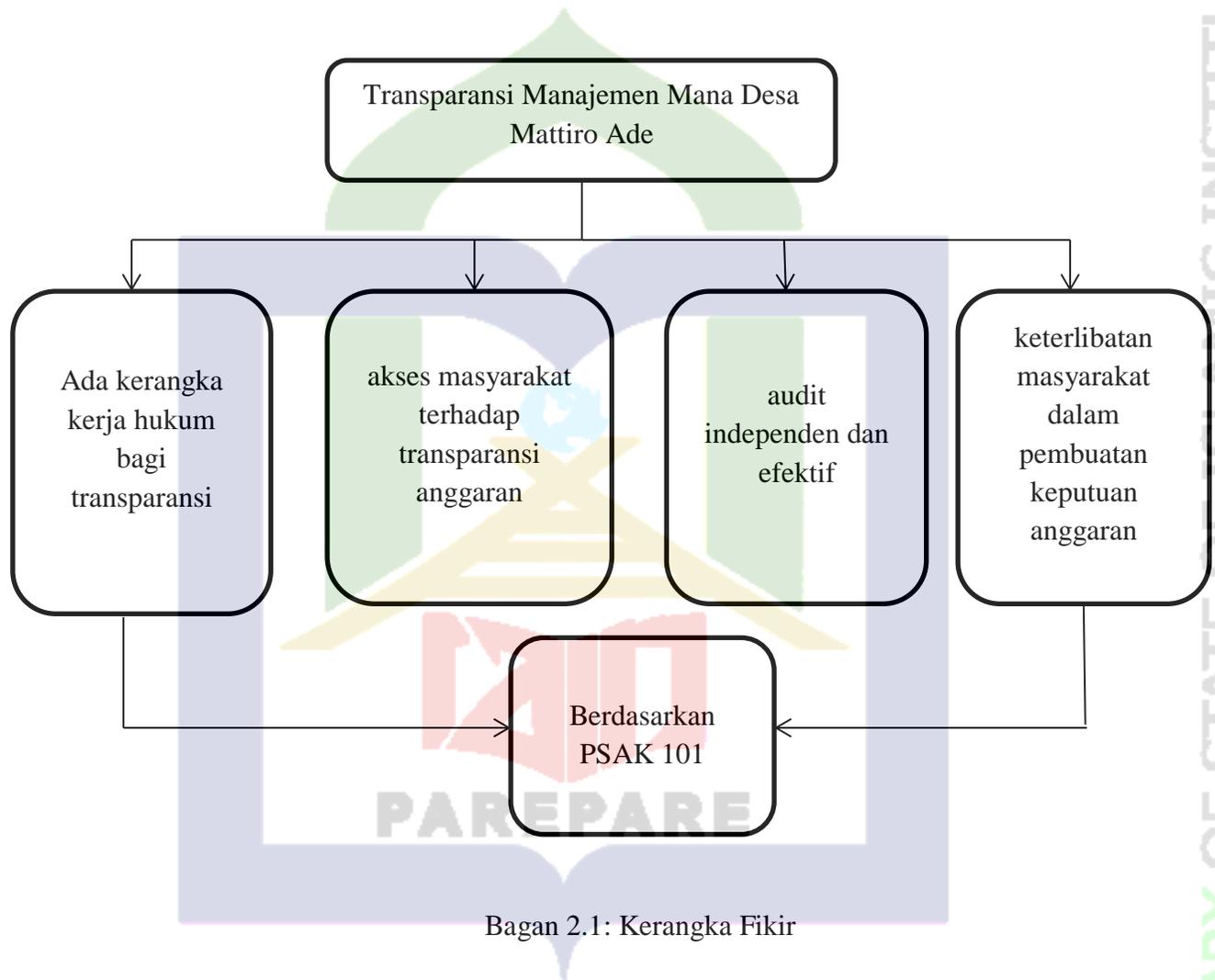
D. Kerangka Pikir

Penjelasan kerangka fikir ini dimulai dari transparansi pengelolaan Dana Desa Mattiro ade sebagai objek penelitian yang akan peneliti lakukan. Transparansi Dana Desa sebagai bukti pengelolaan dana desa yang baik dalam mengelola dana dan program-program pemerintahan lainnya agar masyarakat tau tentang pengelolaan dana desa.

Standar laporan keuangan yang digunakan seharusnya betul-betul bisa menjadi standar laporan keuangan yang baik dan transparansi guna menghilangkan pemikiran negatif masyarakat terhadap dana desa. Alur fikir penelitian ini dimulai dari desa sebagai tempat/lokasi penelitian yang kemudian akan menjadi Transparansi manajemen pengelolaan dana desa sebagai objek penelitian kemudian akan disandingkan dengan PSAk 101 yang muatannya tentang penyajian laporan keuangan keuangan syariah kemudian indikator penguat transparansi yaitu, Ada tidaknya kerangka kerja hukum bagi

⁴⁴ Kementerian Keuangan Republik Indonesia, “*Buku Saku Dana Desa*”. Situs Resmi Kemenkeu. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>. (15 Februari 2021)

transparansi, Adanya akses masyarakat terhadap transparansi anggaran, Adanya independen dan efektif, Adanya keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan anggaran.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam pembahasan ini meliputi beberapa hal yaitu jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, Fokus penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data. Maka dapat penulis uraian sebagai berikut:

Jenis penelitian merujuk pada permasalahan yang penulis angkat dalam pembahasan ini maka penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan pada suatu kejadian yang benar-benar terjadi. Dan berdasarkan masalahnya maka digolongkan sebagai penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif ialah studi yang mendeskripsikan atau menjabarkan situasi dalam bentuk transkrip dalam wawancara, dokumen tertulis, yang tidak dijelaskan melalui angka. Penelitian yang bersifat metode kualitatif adalah metode yang mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam berbagai individu, kelompok masyarakat atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Pendekatan yang akan digunakan ialah pendekatan fenomenologis, yaitu mencari mencari informasi atau dengan mengumpulkan data berupa uraian kata” yang dilakukan peneliti melalui wawancara, observasi maupun dokumentasi dengan berfokus pada pemahaman atau bagian-bagian yang spesifik atau perilaku khusus⁴⁵

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi pada penelitian yang akan dijadikan sebagai tempat pelaksanaan penelitian adalah Kantor Desa Mattiro Ade.

⁴⁵Basrowi dan Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet, I: Jakarta Reineka Cipta, 2008), h.22.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang akan peneliti gunakan dalam merampungkan penelitian ini kurang lebih 2 bulan.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian pada penelitian ini adalah Transparansi Manajemen Dana Desa kabupaten. Pinrang Berdasarkan PSAK 101

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh oleh informan maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik maupun dalam lainnya guna keperluan penelitian tersebut.⁴⁶ Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang di analisis, yaitu primer dan sekunder sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer

Data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti.⁴⁷ Informan adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai sampel dalam penelitian untuk menjawab pernyataan-pernyataan peneliti.⁴⁸ Data primer diperoleh langsung dari lapangan baik yang berupa observasi maupun yang berupa wawancara tentang bagaimana sistem pengelolaan dana desa di kantor Desa Mattiro Ade dengan wawancara langsung kepada kepala desa mattiro ade, Sekretaris Desa, Staf Desa juga masyarakat desa.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk laporan, skripsi,

⁴⁶ Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: PT Reineka Cipta, 2004), h.87.

⁴⁷ Bagong Suyanto dan Surtina, *Metode Pnelitian Sosial*, Edisi III (Cet. III; Jakarta: Kencana Penada Media Group, 2007), h.55.

⁴⁸ Sugiono, *Statistika Untuk Penelitian* (Bandung: CV. Alfabeta, 2002), h.34.

tesis, dan disertai.⁴⁹ Adapun data sekundernya yaitu: hasil dari studi kepustakaan, surat kabar atau majalah dan internet.

E. Teknik Pengelolaan Data

Pada penelitian ini penelitian ini peneliti terlibat langsung di lokasi Penelitian atau penelitian lapangan untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data konkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Adapun teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti untuk mengamati atau mencatat suatu peristiwa dengan menyaksikan langsung dan biasanya penelitian dapat sebagai partisipan atau *observer* dalam menyaksikan atau mengamati suatu objek yang sedang ditelitinya.⁵⁰

Metode observasi langsung yaitu, cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada alat pertolongan standar lain untuk keperluan tersebut.⁵¹ Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang akan diteliti dengan melihat langsung di lokasi penelitian tentang manajemen dana desa di kantor Desa Mattiro Ade Kabupaten. Pinrang.

2. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk mendapatkan informasi (Data) dari informan dengan cara bertanya langsung secara bertatap muka. Dalam penelitian ini peneliti akan melakukan wawancara dengan bendahara desa maupun dengan kepala desa dan masyarakat desa.

⁴⁹Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Sinar Grafiak, 2013), h.106.

⁵⁰Rosadi Ruslan, *Metode Penelitian: Relation & Komunikasi* (Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), h.221.

⁵¹Moh. Nasir, *Metode Penelitian* (Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia: 2005), h.11.

3. Dokumentasi

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang tersedia dalam catatan dokumen yang berfungsi sebagai data pendukung dan pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam.⁵²

F. Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian kualitatif terdiri dari uji *credibility* (validitas data internal)⁵³

Adapun uji keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

Credibility

Uji *Credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti. Agar hasil penelitian yang telah dilaksanakan tidak diragukan sebagai suatu karya ilmiah.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan Pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan atau kredibilitas data. Dengan perpanjangan pengamatan artinya peneliti kembali ke lapangan guna melakukan pengamatan, melakukan wawancara lagi terhadap sumber data yang ditemui maupun sumber data yang baru. Perpanjangan pengamatan artinya hubungan peneliti dengan sumber akan semakin terbuka dan saling terbuka, sehingga data atau informasi yang didapat sudah dapat dikatakan kredibel atau dapat dipertanggungjawabkan maka perpanjangan pengamatan akan diakhiri.

⁵²Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan* (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D), Bandung: Alfabeta, 2016, h.330

⁵³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Cet. II; Pustaka pelajar, 2000), h.40.

b. Meningkatkan Ketelitian dan Kecermatan dalam Penelitian

Meningkatkan ketelitian atau ketekunan secara berkelanjutan maka dapat dipastikan data atau informasi serta knologis peristiwa dapat direkan atau dicatat dengan baik dan sistematis. Meningkatkan ketelitian adalah salah satu cara mengecek/mengontrol tugas atau pekerjaan apakah data yang telah diperoleh, diolah dan disajikan sudah benar atau belum.

Meningkatkan ketekunan dapat dilakukan peneliti dengan membaca beberapa referensi dokumen, penelitian terdahulu dan buku terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang diperoleh. Dengan cara tersebut, maka akan membuat peneliti semakin cermat dalam menyajikan laporan dan menjadi laporan yang berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas berarti melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Sehingga terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan pengumpulan data dan waktu.⁵⁴

1) Triangulasi Sumber

Pengujian kredibilitas dilakukan dengan cara memeriksa data yang telah diperoleh dari berbagai sumber. Data tersebut dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang selanjutnya akan dimintai kesepakatan (*member check*) dengan tiga sumber data.⁵⁵

⁵⁴Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta. 2007). h. 273

⁵⁵Sugiyono. Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R & D (Bandung: Elfabeta. 2007). h. 274

G. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah tersusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam menganalisis data menggunakan data deduktif yaitu cara berfikir dengan cara menganalisis data-data yang bersifat umum yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi beserta.⁵⁶

Dokumentasi, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus atau berangkat dari kebenaran yang bersifat umum mengenai suatu fenomena dan mengeneralisasikan kebenaran tersebut pada suatu peristiwa atau data tertentu yang berindikasi sama dengan fenomena yang bersangkutan.

1. Reduksi Data (*data Reduction*)

Membuat rangkuman, memilih hal-hal pokok yang penting, mencari tema dan pola, membuang data yang dianggap tidak penting. Reduksi data berlangsung terus-menerus sampai sesudah penelitian lapangan sampai laporan akhir lengkap tersusun.

2. Penyajian data (*data display*)⁵⁷

Data diarahkan agar terorganisasi, tersusun dalam pola hubungan, dalam uraian naratif, seperti bagan, diagram alur (*flow diagram*), tabel dan lain-lain. Data yang diperoleh baik dari studi kepustakaan (data sekunder) maupun dari penelitian lapangan (data primer) akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan melihat pengelolaan dana.⁵⁸

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*) atau verifikasi

Pengumpulan data pada tahap awal (studi pustaka) menghasilkan kesimpulan sementara yang apabila dilakukan verifikasi (penemuan bukti-bukti atau fakta-fakta yang terjadi di lapangan) dapat menguatkan kesimpulan awal atau menghasilkan

⁵⁶Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi penelitian sosial*(Jakarta: Kencana, 2007), h.69.

⁵⁷H.B Sutopo, *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*,(Cet. I; Surakarta: UNS Press, 2002), h.91-93

⁵⁸Basrowi Suandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Rineka Indah, 2008), h.158.

kesimpulan yang baru. Kesimpulan-kesimpulan akan ditangani dengan longgar, tetap terbuka, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, meningkat menjadi lebih rinci dan mengakar dengan pokok. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung.



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Manajemen Dana Desa

Manajemen dana desa dilihat Dari rancangan melalui MUSREMBANG arah kebijakan pembangunan desa di mana harus mencapai dan mendukung visi-misi desa dengan mempertimbangkan kondisi, potensi dan peluang yang dimiliki desa dalam mengatasi masalah dan kendala di desa. Kemudian berdasarkan hasil perencanaan yang kemudian dilakukan penetapan dalam musyawarah desa dan setelah tindakan yang layak ditetapkan. Maka kegiatan pembangunan yang sejenis akan dikelompokkan dalam program-program pembangunan tersebut dikelompokkan kedalam masing-masing bidang kewenangan desa yakni penyelenggaraan pemerintahan desa pembangunan desa pembinaan kemasyarakatan desa, pemberdayaan masyarakat desa juga dan penanganan bencana.

Strategi atau rencana pembangunan Desa Mattiro Ade dimana harus meningkatkan kapasitas dan kualitas pelayanan publik agar masyarakat mudah mengakses juga dapat memacu pemerataan dan pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, agama dan sosial budaya hal ini yang akan menggali dan meningkatkan seluruh potensi SDA dan SDM dengan berbagai bidang, berdasarkan hal tersebut akan mampu meningkatkan kualitas dan kuantitas keagamaan dan kebudayaan melalui hal ini masyarakat akan aktif mengikuti program-program kemajuan desa dan pemerintahan daerah, Provinsi dan Pusat.

Masyarakat akan berpartisipasi juga berperan aktif dalam kegiatan dan mendorong kemajuan dan pembangunan desa, menyukseskan semua program-program pembangunan yang dicanangkan oleh pemerintah untuk meningkatkan pendapatan dari hasil usaha desa dengan membangun usaha milik desa juga mengoptimalkan pendapatan dari pengelolaan kekayaan desa mengidentifikasi retribusi pendapatan desa, mengadakan kerjasama dengan pihak investor yang bisa menanamkan modalnya dalam pengembangan potensi yang ada di dalam wilayah desa Mattiro Ade

dengan berkordinasi secara aktif dengan instansi-instansi terkait baik di Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Pusat.

Bentuk manajemen dana desa juga di rampungkan bersama tokoh-tokoh masyarakat agar masyarakat mampu melihat bagaimana sistem dan bentuk manajemen dana desa yang akan di lakukan setiap ingin melalukan pembangunan maupun adanya bantuan-bantuan yang ada untuk masyarakat desa

1). Perencanaan

Perencanaan proses yang dilakukukan unntuk membuat strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan, untuk mengawali setiap aktivitas yang akan dilaukan sebagai tahap pertama untuk menentukan arah dan tujuan menekan atau meminimalisir kemungkinan resiko kesalahan dan kegagalan yang akan dilakukan dapt tercapai.

“Rustan Sali mengatakan pertama itu ada yang namanya musyawarah dusun itu karna di mattiro ade ada empat dusun setiap dusun itu masing-masing di lihat skala prioritas dan tidak ada satupun kegiatan yang tidak di lakukan musyawarah makanya ada yang namanya musyawarah dusun itulah yang dibawa nanti kemusyawarah desa disitulah dibicarakan berapa besar anggaran yang di butuhkan dalam setiap hitungan program kegiatan sehingga semua dusun itu mempunyai skala prioritas disitulah kita melihat yang mana memang skala prioritas yang dusun akan di masukkan dalam rencana kerja untuk tahun anggaran tahun tersebut makanya di hadirkan semua elemen masyarakat ini tokoh-tokoh masyarakat atau pemuda LKD dan BPD untuk membicarakan seberapa banyak anggran yang di butuhkan dalam satu dusun”⁵⁹

Mendegar dari apa yang disampaikan oleh narasumber tersebut dapat dijabarkan bahwa sebelum mengeluarkan keputusan ada yang dikatakan musyawarah desa pada musyawarah desa disini untuk membicarakan rencana kerja dan anggaran yang akan digunakan empat dusun, segala sesuatu atau segala keluh kesah yang ada di masyarakat akan dikumpulkan ataupun vasilitas yang kurang memadai untuk masyarakat, segala kebutuhan masyarakat akan di bicakan melalu musyawarah dusun, dengan melihat setiap dusun masing-masing memiliki skala prioritas disini dilihat

⁵⁹. Rustan Sali, Kepala Desa Mattiro Ade’ (Wawancara Tanggal 19 agustus 2021).

skala prioritas bahwa inilah dusun yang memang sangat mendesak untuk diadakan pembangunan kemudian setiap kegiatan selalu di adakan musyawarah dengan menghadirkan para elemen masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat pemuda LKD dan BPD kemudian akan di serakan kekepala desa untuk di setujui.

“Herman mengatakan perencanaanya itu bisa dilakukan musdus (musyawarah dusun)kemudian penyusunan perencanaan kemudian melihat berapa besar anggarannya terus dilaksanakan untuk penyusunan APBDES kemudian di paparkan apa yang menjadi kendala untuk dilaksanakan pembangun untuk tahun berikutnya atau untuk tahun yang akan berjalan”⁶⁰

Mendegar dari apa yang di sampaikan oleh narasumber sebelum melakukan kegiatan harus di adakan musyawarah dusun di musyawarah dusun disitulah akan di rampung segala saran-saran yang ada dari masyarakat baik dari pembangun ataupun bantuan dengan melihat berapa besar anggaran yang akan digunakan, anggaran yang digunakan pada pembangunan harus memiliki rencana yang baik dan terstruktur kenapa demikian seperti itu karna sperti yang kita lihat bersama bahwa hal yang paling sensitif adalah pemvangunan jadi rencana anggaran harus disusun dengan baik dan benar. kemudian dilaksanakan APBDES dan dipaparkan apa yang menjadi kendala untuk pelaksanaan kegiatan dan pembangunan.

“Hamdana mengatakan perencanaan angka manang ni sesuai kebutuhan na masyarakat rekeng to apa-apa kan istilahnya perencanaan dari masyarakat ji juga, yang pasti bukan kami yang merencanakan sepenuhnya mrencanakan yang jelas itu masukan dari masyarakat begitupun realisasinya pokonya dari masyarakat semua tidak di bilang kita staf desa atau aparat desa kita yang menentukan semuanya artinya ini penyetujuan masyarakat yang merencakan memasukkan dan nanti itu kami yang menyetujui bapak yang menyetujui”⁶¹

Artinya : Hamdana mengatakan perencanaan semua sudah ada dan sesuai kebutuhan masyarakat apapun seperti perencanaan semua penuh dari masyarakat juga, yang jelas bukan kami yang merencanakan sepenuhnya, yang merencanakan yang jelas itu masukan dari masyarakat begitupun realisasinya bahkan bisa dibbilang semua dari masyarakat sedangkn kami staf desa atau aparat desa kita yang

⁶⁰ Herman, Sekretaris Desa Mattiro Ade’(Wawancara Tanggl 19 Agustus 2021)

⁶¹ Hamdana, Staf Desa Mattiro Ade’(Wawancara Tanggal 19 Agustus 2021)

menentukan semuanya dalam artian ini penyetujuan masyarakat dan perencanaan sisanya kami yang dari staf desa desa dan bapak yang menyetujuinya.

Dari apa yang disampaikan narasumber semua ada sesuai dengan kebutuhan masyarakat apun itu masyarakat akan menyampaikan kebutuhan dusunnya masing-masing karna perencanaan semua dari masyarakat masukan-masukan dari masyarakat dalam artian masyarakat menyusun segala rencana-rencana kerja, masyarakat diberi tanggungjawab penuh dalam menrancang segala kebutuhan mulai dari pembangunan, bantuan dan masih banyak kebutuhan-kebutuhan masyarakat kemudian yang akan menyetujui semua aparat desa dan kepala desa hal ini sangat diharapkan masyarakat karna apa yang di rencanakan mereka berharap penuh dapat terealisasikan untuk melihat desa lebih maju.

2. Pengorganisasian

Proses kegiatan atau alokasi sumber daya organisasi dalam bentuk organisasi atau struktural organisasi sesuai dengan tujuan dengan melihat SDM meliputi tenaga kerja/ karyawan , baik dari level operasional sampai dengan manajerial.

“Rustam mengatakan bahwa di dusun alhamdulillah dalam hal sistem pengelolaan dana desa alau berbicara masalah sumber daya manusianya di desa paling bervariasi awamnya ada masyarakat awamnya ada masyarakat menengahnya ada masyarakat tuanya kalau kita melihat sekarang kondisi desa yang ada yang dibanding sebelumnya itu alhamdulillah SDM kita itu sudah mulai bagus dibanding tahun-tahun sebelumnya hampir setiap rumah itu tidak adalagi anak-anak yang tidak sekolah bahkan di setiap rumah itu tidak pernah lagi kita dapatkan anak-anak yang tidak kuliah orang tua yang tidak menguliahkan anaknya bahkan di setiap rumah itu ada berapa foto toga ada yang sudah S1 atau S2 bahkan S3 setiap desa itu.”⁶²

Mendegar dari apa yang di sampaikan narasumber di desa dalam hal sistem pengelolaan dana desa dan berbicara masalah sumber daya manusia itu ada bervariasi yang pertama ada yang namanya masyarakat awam yang kedua ada yang namanya masyarakat menengah dan yang ketiga ada yang namanya masyarakat tua , dan melihat kondisi desa saat ini sangat berubah pesat dibanding desa yang sebelumnya mengapa demikian saat ini SDM desa sekarang sudah agak membaik

⁶² Rustam, Kepala Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

dibanding tahun sebelumnya karna melihat tenaga pendidik dulunya masih sangat menim anak-anak dulunya malas akan pendidikan malas untuk melanjutkan pendidikan tetapi sekarang atau saat ini anak-anak maupun remaja sampai dewasa sangat mementingkan pendidikan yang notabeneanya memang sudah menginjak pendidikan kejenjang yang sangat tinggi hal ini dapat kita lihat dengan kemajuan desa yang bisa dibilang sudah termasuk desa berkembang.

“Herman mengatakan bahwa yah itu tadi seperti saya bilang mulai dari musyawarah dusun baru tingkat desa dan dipaparkan apa yang menjadi kendala”⁶³

Mendegar dari apa yang dikatan narasumber bahwa hal ini sama dengan yang disampaikan sebelumnya struktural organisasi sama dengan apa yang di rencanakan jadi apa yang sudah di rencakan itulah yang terbentuk menjadi ssebuah struktural yang akan dijadikan pedoman untuk melaksanakan apa-apa yang telah direncanakan disusun dengan baik dan disetujui oleh pala desa itu sendiri mulai dari tingkat dusun lalu ketingkat desa untuk melihat apa yang menjadi kendala jadi setelah strukturalnya sudah dibentuk sedemikian rupa semua akan siap untuk dijalankan.

“Hamdana mengatakan bahwa ada untuk itu strukturalnya termasuk rekeng kaya pkk ada lengkap alhamdulillah, ada pokja ada swisma.pokja Kelompok kerja dan sawisma hampir sama ji pkk,pkja kaya sawisma to ada masyarakat yang ada dio kelompok itu biasanya kaya ada satu kelompk itu yang mendata masyarakat yang lain.”⁶⁴

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber struktural yang dimaksud seperti pkk, masalah struktur lengkap ketika struktural yang dibentuk sedemikian rupa dan dijadikan acuan atau landana dalam mrlakanakan kegiatan dalam hal ini seperti PKK, POKJA(Kelompok Kerja) dan SAWISMA di mana struktural ini diberi amanah langsung untuk mendata semua data-data masyarakat yang di perlukan. Hal ini membuktikan bahwa dalam hal struktural itu di buat dengan baik dan betul-betul terstruktur, ini juga akan menjadi pemenuhan SDM yang ada karna melihat dari apa

⁶³ Herman, Sekretaris Desa Mattiro Ade’(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

⁶⁴ Hamdana, Staf Desa Mattiro Ade’(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

yang disampaikan tenaga kerja yang digunakan cukup baik sehingga aparat desa nantinya tidak kewalahan dalam hal mendata semua masyarakat desa karena adanya beberapa tim khusus yang di siapkan untuk mendata.

3. Pelaksanaan

Suatu tindakan untuk mengusahakan agar semua anggota kelompok berusaha untuk mencapai sasaran yang sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha organisasi, proses implementasi dari segala bentuk rencana, konsep, ide dan gagasan yang bentuk rencana, konsep, ide dan gagasan yang telah sebelumnya disusun, baik pada level manajerial maupun level operasional dalam rangka mencapai tujuan.

“Rustam mengatakan bahwa semua dusun harus ada dalam artian tetap ada pemerataan makanya saya bilang tadi tetap ada pemerataan setiap dusunnya tergantung dari segala prioritasnya namun berdasarkan luas dan jumlah penduduknya karena empat dusun ini semua beda penduduknya dengan luas wilayah makanya tergantung dari luas wilayah dengan jumlah penduduknya dalam hal rencana pengelolaan dana desa artinya bahwa tidak akan mungkin itu kita mengucurkan dana begitu besar kepada dusun yang hanya sedikit penduduknya dan luas wilayahnya sangat sedikit makanya tergantung dari luas wilayah dengan skala prioritas yang akan di kerja apakah memang sudah mendesak untuk dikerja makanya itu yang jadi program kerja utama”⁶⁵

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa pelaksanaan dana desa semua dusun mendapatkan dana dalam artian adanya pemerataan di setiap dusun di lihat dari skala prioritas dimana hal ini di lihat dari luas wilayah dan jumlah penduduk, dalam hal perencanaan dana desa tidak akan mengeluarkan dana begitu banyak kepada dusun yang memiliki wilayah dan jumlah penduduk yang sedikit karena dana yang dikeluarkan memang sudah sesuai dengan luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing dusun, wilayah dengan skala prioritas akan dan sudah mendesak akan dijadikan program kerja utama untuk di kerjakan jadi setiap kegiatan dilaksanakan secara terstruktur agar semua terpenuhi dalam hal pembanguana dengan melihat skala prioritas bukan menentu bahwa ada dusun yang tidak dapat

⁶⁵ Rustam, Kepala Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

pembangunan akan tetapi betul-betul melihat dusun yang memang sudah sangat mendesak.

“Herman mengatakan bahwa begitu kalau dibidang pembangunannya dibidang pembangunan dusun ini sudah dibahas di tingkat dusun ini lalu di musyawarakan lagi di tingkat desa bilang ini yang jadi prioritas untuk perencanaannya yang akan datang. Kalau masalah pembangunannya selama ini kita laksanakan swakelola artinya pelaksanaannya yang bagus jadi ceritanya tidak ada kendala karena banyak tahap yang melewatinya dari inspektorat pemeriksaan dari pendamping desa baru kita bilang bagus atau tidaknya”⁶⁶

Mendengar dari apa yang di sampaikan oleh narasumber bahwa dibidang pembangunan telah dibahas di tingkat dusun lalu dibawa ke tingkat desa yang mana akan dijadikan prioritas. Kemudian masalah pembangunan selama ini dilaksanakan swakelola dalam artian pembangunan sudah baik dan tidak ada kendala karena sebelum itu harus melalui beberapa tahap dari inspektorat dan pendamping desa itu sendiri”

“Hamdana mengatakan bahwa alhamdulillah untuk yang tahap-tahap yang kemarin itu lancar cuma yang ini semenjak corona 2020 dan 2021 banyak perencanaan pekerjaan fisik tidak tercover karena di alihkan pengalihan dana ceritanya kebanyakan bantuan sekarang, sekarang 2021 lihat malah ada beberapa fisik yang tertunda bahkan banyak malahan hampir semua karena ada beberapa fisik yang ini yang sempat kita kerjakan karena semua dana, lebih kalau untuk masyarakat alhamdulillah merata karena beberapa bantuan ada BLTD, BST ada BPMT dan ada PKH hampir rata karena maksudnya mungkin kalau ada yang nderekeng nalattu maksudnya kita tidak terlalu tahu itu apa yang paling tau itu kepala dusun dia yang paling tahu masyarakatnya toh yang ini butuh bantuan yang ini yang tidak. Dan ada juga sih banyak macamnya pelatihan-pelatihan seperti itu kan kita kalau dana di sini larinya kesini semua tidak ada yang keluar untuk gaji staf.”⁶⁷

Mendengar dari apa yang di sampaikan narasumber *alhamdulillah* untuk tahap-tahap yang kemarin berjalan dengan baik masalah pelaksanaan akan tetapi semenjak masuk tahun 2020-2021 banyak sekali terkendala karena corona apalagi pada masalah

⁶⁶ Herman, Sekretaris Desa Mattiro Ade' (Wawancara Tanggal 19 Agustus)

⁶⁷ Hamdana, Staf Desa Mattiro Ade' (wawancara Tanggal 19 Agustus)

pembangun fisik banyak sekali kendala karna dana yang di peruntukkan untuk pembangunan dilariakn ke bantuan. Kemudian masalah bantuan sudah merata karna banyaknya bantuan yang ada seperti BLTD, BST, BPMT, PKH hampir rata kalaupun ada yang tidak rata di luar dari tanggungan desa karna yang mengetahui masalah kondisi masyarakat adalah kepala dusun. Dan adanya pelatihan-pelatihan kemudian dana yang digunakan memang untuk dana yang sudah peruntukkan untuk pembangunan dana bantuan sama sekali tidak ada yang di keluarkan untuk gaji staf.

4. Pengevaluasian

Alat dan fungsi manajemen untuk melakukan kontrol atau evaluasi terhadap kinerja organisasi. Dalam hal ini guna memastikan bahwa apa yang sudah direncanakan, disusun, dan ndijalankan dapat berjalan sesuai dengan aturan main atau prosedur yang telah dibuat. Selain itu, fungsimanajemen ini akan bisa memonitor kemungkinan ditemukannya penyimpangan dalam praktik pelaksanaannya, sehingga bisa terdeteksi lebih dari untuk dapat dilakukan upaya pencegahan dan perbaikan.

Pada dasarnya pengawasan merupakan tindakan lanjut dari fungsi-fungsi sebelumnya bahwa dalam serangkaian fungsi atau aktivitas dalam sebuah organisasi dibutuhkan kontrol atau evaluasi guna memastikan bahwa semua dijalankan sesuai dengan standar dan aturan yang berlaku.

“Rustam mengatakan bahwa jadi sebenarnya disini ada di desa itu ada yang namanya tim pengelola kegiatan jadi kepala desa itu hanya kuasa penuh anggaran bukan kita yang kelola ada yang namanya tim pengelola kegiatan TPK namanya, TPK itu bekerja berdasarkan juknis yang ada yang kedua TPK tidak semenah-menah melaksanakan atau mengerjakan apaka itu fisik apakah itu masalah pelatihat-pelatihan itu TPK tidak semerta-merta ada memang pertama ada yang namanya pengawas tingkat pengawas di desa BPD(Badan pengusunan didik) itu yang menegontrol yang kedua setiap dana desa yang keluar perempat bulan di setiap selesai kegiatan ada yang dinamakan pemeriksaan fisik dan administrasi yang pertama memeriksa adalah tim kecamatan yang meliputi orang-orang tekhnis juga bersama dengan konsultan dan ada memang pendamping desa di, di setiap desa ada yang namanya pendamping kecamatan bekerja sama dengan pemeriksaan fisik dan

administrasi setelah itu ada lagi pemeriksaan dari tingkat kabupaten ada yang namanya inspektorat atau bawasda bahkan hampir setiap tahun.⁶⁸ kami selalu mendapatkan pemeriksaan dari BPK dan BPKP tapi ini tidak merata karna hanya sampel alhamdulillah hampir semua desa sudah di periksa oleh BPK dan BPKP”

Mendegar dari apa yang di sampaikan narasumber di desa ada yang namanya tim pengelola kegiatan jadi kepala desa hanya memiliki kuasa penuh mengenai anggaran bukan merekan yang mengelola karna memang ada yang namanya tim pengelola kegiatan TPK. TPK harus bekerja berdasarkan juknis yang telah di atur TPK tidak boleh semena-mena melaksanakan kegiatan atau pemeriksaan fisik dan administrasi. Karna yang memeriksa pertama adalah tim kecamatan yang memang bersama orang-orang teknis dengan konsultan, kemudian ada yang dinamakan pendamping desa dan memang setiap desa memiliki pendamping desa juga ada yang dinamakan pendamping kecamatan bekerja sama dengan pemeriksa fisik dan administrasi, setelah itu di bawa ke tingkat kabupaten yang namanya inspektorat atau bawasda. Hampir setiap tahun desa selalu mendapatkan pemeriksaan dari BPK dan BPKP tapi hal ini tidak merata karna Desa Mattiro Ade hanya dijadikan sampel untuk di periksa oleh BPK dan BPKP.

“Herman mengatakan bahwa tidak terganggu ji karna terlaksana semua ji kegiatannya”⁶⁹

Mendegar dari apa yang disampaikan bahwa melihat dari apa yang sudah di rencanakan, pengorganisasian dan pelaksanaan hingga pengevaluasian tidak terganggu karna semua kegiatan yang dilakukan semuanya terlaksana sampai saat ini hal ini dapat artikan selama kegiatan yang dilakukan apa-apa saja yang sudah di rencanakan selama ini tidak pernah ada kendala sama sekali semua berjalan sesuai yang di inginkan. Jadi bisa disimpulkan bahwa mulai dari perencanaan semua berjalan dengan baik tanpa ada kendala baik dari segi pembangun dan pendanaan semua dilakukan

⁶⁸ Rustam, Kepala Desa Mattiro Ade’(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

⁶⁹ Herman, Staf Desa Mattiro Ade’(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

dengan baik, hal ini akan menjadi pedoman untuk desa kedepan telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan apa yang di harapkan arapat desa maupun masyarakat.

“Hamdana mengatakan bahwa selalu bagus karna kenapa memang sudah ada poksinya ada memang tomi anunya bilang ini kesini ini kesini jadi ndegagana yaseng alesse-lesse ero danae toh bilang dilarikan kesini tidak karna memang sudah sesuai dengan perencanaan itu yah itu tomi, itumi dananya seperti dana fisik ada memang mi danany tertulis bilang segini jadi tidak ada dobilang biar cippe 50 tidak ada karna memang mentong mi disitu anunya pokonya harus sesuai tidak ada rekeng dibilang eh palesseni jolo lao okkonoe pokonya apa yang sudah direncanakan itumi yang jadi, karna sebekum terealisasi di lapor memang dulu jadi memang pura memang ni taroki makkada sekian-sekian, harus ni sicocok memang iyero makkada sekian jadi pas keluar pada rekeng bendahara toh berapa uang keluar segitu juga uang yang harus dikeluarkan karna angka memang na rekeng list na toh makkada sekian-sekian jadi sesuai kebutuhannya jadi kalau cippe dalam pelaporan 50 iu nda ada berapapun”⁷⁰

Artinya :

Hamdana mengatakan bahwa selalu bagus karna kenapa memang sudah ada poksinya memang sudah ada dananya bahwa ini kesini dan ini kesini jadi tidak ada yang namanya pindah-pindah dana bilang dilarikan kesini tidak karna memang sudah sesuai dengan perencanaannya yang itu yah itu, jadi itulah seperti dana fisik memang sudah ada yang tertulis mengatakan sekian jadi tidak ada dana yang terpotong 50 tidak ada karna memang sudah ada dana yang sesuai dan tidak ada memang berpindah ke pembangunan lain. Pokoknya apa yang sudah direncanakan itulah yang akan dijalankan. Karna sebelum terealisasi dilaporkan terlebih dahulu jadi sudah tertulis bahwa sekian-sekian. Harus cocok semua mengatakan bahwa sekian jadi, seperti bendahara berapa uang yang di keluarkan sekian juga yang harus keluar karna memang sudah ada list mengatakan sekian-sekian jadi sesuai kebutuhannya jadi kalau ada yang terpotomg dalam pelaporan 50 itu tidak ada berapapun itu.

⁷⁰ Hamdana, Staf Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

Mendengar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa pengevaluasiannya sudah bagus karna dilaksanakan sesuai dengan poksinya jadi memang betul tidak ada dana yang disalah gunakan sepeserpun. Hal ini memang sudah sesuai dengan apa yang sudah di rencanakan, apapun yang tertulis itulah yang harus dilaksanak si an, jadi ketika ada dana fisik yang sudah di tentukan nominal tidak bisa jadi ubah lagi dan itu tidak akan dilarikan kemana-mana ataupun di potong sepeserpun, apapun yang sudah direncanakan itulah yang harus dilaksanakan jadi sebelum terealisasi harus ada pelaporan sebelumnya bahwa sekian dana yang akan digunakan dan harus sesuai. Seperti pada saat bendahara mendapatkan transferan uang berapun uang yang di transferkan sekian yang harus di lakukan jadi memang betul-betul tidak ada uang di salah gunakan bahkan ketika ada pelaporan tidak akan ada terpotong sepeserpun. Adapun bentuk daftar isian penggunaan DD (Dana Desa).

Tabel 4.1 : Daftar Isian Rencana Kegiatan Penggunaan DD Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN APBDES	JUMLAH BIAYA (Rp)		
		TRIMULAN I (40%)	TRIMULAN II (40%)	TRIMULAN (20%)
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	62.409.200	62.409.200	-	-
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	297.622.380	85.345.000	187.077.380	25.200.000
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	48.221.320	39.772.650	8.448.670	8.448.670
D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	68.281.000	-	68.281.000	
E. Bidang Penanggulangan	525.600.000	175.200.200	175.200.000	175.200.000
F. Pengeluaran pembiayaan	150.000.000	97.046.750	23.466.450	29.486.800

Jumlah	1.152.133.900	459.733.600	462.473.500	229.886.800
Silpa DDS 2020	2.699.900	-	2.699.900	-
	1.149.434.000	459.773.600	459.773.600	229.886.800

Tabel 4.2 : Daftar Isian Rencana Kegiatan Penggunaan DD Tahun 2021

URAIAN	ANGGARAN APBDES	JUMLAH BIAYA (Rp)		
		TRIMULAN I (40%)	TRIMULAN II (40%)	TRIMULAN III (20%)
A. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	27.998.000	-	4.230.000	23.768.000
B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan	880.451.929	392.811.929	345.711.600	141.928.400
C. Bidang Pembinaan kemasyarakatan	7.159.400	-	-	7.159.400
I Jumlah A+B+C	915.609.329	392.811.929	349.941.600	172.855.800
II Silpa DDS 2019	51.330.329	47.100.329	4.230.000	-
III	864.279.000	345.711.600	345.711.600	172.855.800

Bisa kita lihat dari tabel di atas bentuk manajemen dana desa desa yang telah di rencanakan dengan semua elemen masyarakat yang ada di desa Mattiro Ade atau yang mewakili serta semua pihak yang berkepentingan lalu di bawah untuk di setujui kepala desa untuk di laksanakan.

Dari hasil perencanaan di atas nampak bahwa manajemen dana desa dilakukan sesuai dengan langkah-langkah dalam manajemen dana desa. Perencanaan di atas dijadikan petunjuk dan pentu arah dalam melaksanakan pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat selama menjabat.

Kenudian dijadikan tolak ukur keberhasilan perangkat Desa Mattiro Ade dalam laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan laporan keuangan pertanggung jawaban petinggi Desa Mattiro Ade yang diserahkan kepada BPD atau masyarakat.

B. Pelaksanaan Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten. Pinrang Berdasarkan PSAK 101

Pelaksanaan transparansi manajemen dana desa sangat penting untuk masyarakat tentang keterbukaan dana desa yang membuat masyarakat tidak ragu dalam hal pelaksanaan manajemen dana desa. Keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya public kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi, transparansi di sini juga memberikan arti bahwa anggota masyarakat memiliki hak dan akses yang sama untuk mengetahui proses anggaran karna menyangkut aspirasi dan kepentingan masyarakat, terutama pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat banyak.

Salah satu aktualisasi nilai dan prinsip-prinsip good governance adalah transparansi aparatur dan sistem manajemen public harus mengembangkanketerbukaan dan sistem akuntabilitas. Pemerintahan yang baik (good governance) sasaran pokoknya adalah terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, kepastian hukum, transparan, akuntabel, memiliki kredibilitas, bersih, peka dan tanggap terhadap segenap kepentingan dan aspirasi yang didasari etika, semangat pelayanan pertanggungjawaban publik.⁷¹

Transparansi juga menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan dalam menjalankan mandate dari rakyat. Mengingat pemerintahan saar memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintahan harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk

⁷¹Dwipayana, Adan E. Suntoro. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta.

disembunyikan dengan demikian transparansi menjadi instrument penting yang menyelamatkan uang rakyat dari perbuatan korupsi.

Manajemen keuangan daerah atau pengelolaan keuangan daerah semuanya dapat dipahami dari pemahaman tentang anggaran daerah. Salah satu indikator keberhasilan keuangan otonomi daerah adalah bagaimana pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah mampu menggunakan dan memanfaatkan sumber daya dimiliki secara lebih efektif dan efisien melalui sumber-sumber daya public dalam membiayai aktivitas pembangunan yang dilakukan. Sehingga dengan adanya pengelolaan sumber keuangan daerah yang efektif dan efisiensi maka program-program dalam pelaksanaan otonomi daerah akan semakin mencapai suatu keberhasilan, dan pengelolaan daerah yang dikenal manajemen keuangan daerah. Manajemen keuangan daerah dilaksanakan berdasarkan pada prinsip-prinsip yang harus dipatuhi sebagai cara untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah.⁷²

1. Kerangka Kerja Hukum

Dalam pelaksanaan Dana desa tentu ada hukum yang melandasi, ada hukum yang mengatur pelaksanaan dana desa, Kepala Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang, Peraturan Kepala Desa Mattiro Ade Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 peraturan desa Nomor 1 Tahun 2019 maka perlu menyusun peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Mattiro Ade Tahun 2019;

⁷² Waluyo. 2007. Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah). Bandung: CV. Mandar Maju.

Tabel 4.3: Peraturan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019

No	Penjabaran Modal		Anggaran Pendapatan
1	Pendapatan Desa		
	A	Pendapatan Asli Desa	Rp. 0,-
	B	Transfer	Rp. 1.925.266,-
	C	Lain-lainnya Pendapatan yang sah	Rp. 3.407.299,-
		Jumlahnya Pendapatan	Rp. 1.728.673.299,-
2	Belanja Desa		
	A	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp. 407.882.585,-
	B	Bidang Pembangunan	Rp. 1.404.400.119,-
	C	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 5.000.000,-
	D	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 162.572. 410,-
	E	Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 8.705.006,-
		Belanja Desa	
		Jumlah Belanja	Rp. 1.988.559.710,-
		Surplus / (Defisit)	Rp. (59.886.411,-)
3	Pemberdayaan Desa		
	A	Penerimaan Pembiayaan	Rp. 59.886.411,-
	B	Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0,-
		Selisih Pembiayaa (a-b)	Rp. 59.886.411,-
		Sisa Lebih Perhitungan Anggaran	Rp. 0,00

Uraian lebih lanjut penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa Sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan Kepala Desa ini.

Pelaksanaan penjabaran anggaran pendapatan belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan. Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Agar Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam berita Desa Mattiro Ade.

Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 4 peraturan Desa Nomor 01 tahun 2020 tentang Anggaran pendapatan dan belanja Desa Tahun Anggaran 2020, maka perlu menyusun

peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan belanja Mattiro Ade Tahun Anggaran 2020.

Tabel 4.4: Peraturan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020

No	Penjabaran Modal	Anggaran Pendapatan
1	Pendapatan Desa	
	A Pendapatan Asli Desa	Rp. -
	B Transfer	Rp. 1.919.489.00
	C Pendapatan Lain-lainnya	Rp. 7.376.109
	Jumlah Pendapatan	Rp.1.926.865.109
2	Belanja Desa	
	A Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp 539.964.097
	B Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 1.405.351.417
	C Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 14.159.400
	D Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 48.015.000
	Belanja Desa	
	E Bidang penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 12.629.667
	Jumlah Belanja	Rp. 2.020.119.581
	Surplus / Defisit	Rp. (93.254.472)
3	Pembiayaan Desa	
	A Penerimaan Pembiayaan	Rp 93.254.472
	B Pengeluaran Pembiayaan	Rp. -
	Selisih Pembiayaan (a-b)	RP. 93.254.472

Uraian lebih lanjut penjabaran anggaran pendapatan dan belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagaian tak terpisahkan dari peraturan Keapala desa ini.

Pelaksanaan penajabaran anggaran pendapatan belanja Desa yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksanaan kegiatan anggaran.

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Mattiro Ade.

“Rustam Sali mengatakan bahwa ada yang namanya papan transparansi ini yang akan di input kepusat harus klop jadi ada yang namanya perencanaan itu akan terkirim dan terinput kepusat pada masuk di inspektorat dan BKP pada saat pemeriksaan itu di klopkan itu oh benar ini yang dikerjakan sekian panjangnya sekian volumenya sekian anggaran yang digunakan sekian pajak yang di pake artinya dalam hal dana tidak bisa main-main karna semua betul-betul, makanya saya katakan bahwa seandainya semua dana hampir sama dengan dana desa yang pertama efisien mungkin pelaksanaannya dalam hal pengelolaannya kemudian betul-betul kita manfaatkan masyarakat yang kurang mampu untuk mensejahterakan masyarakat itu artinya bahwa seandainya dana desa sama dengan APBD bahwa disampaikan masyarakat bahwa sekian anggarannya maka saya rasa mungkin tidak ada orng yang main-main di tingkat masalah kontraktor dan kita bukan kontraktor kita hanya tim pengelola kegiatan yang melibatkan masyarakat”⁷³

Mendengar dari apa yang di sampaikan oleh narasumber bahwa masalah hukum ada yang namanya papan transparansi yang akan di input kepusat dan semuanya harus sesuai mulai dari perencanaan semua akan dikirim kepusat untuk diperiksa inspektorat dan BKP, kemudian pada saat pemeriksaan semua harus di klopkan bahwa data ini sudah benar dan dana yang digunakan juga pajak yang digunakan artinya dalam hal pelaporan memang harus betul-betul dikerjakan dengan baik dan benar, makanya dalam hal ini dana yang digunakan hampir semua sama dengan dana yang dilaksanakan seefisien mungkin dalam hal pelaksanaan dan pengelolaannya, dan betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin untuk membantu masyarakat yang kurang mampu untuk mensejahterakan masyarakat. Dan desa tidak sama dengan APBD karna ini akan di sampaikan kemasyarakat bahwa anggaran yang digunakan sekian namun perlu diketahui bahwa aparat desa bukan pekerja sama halnya dengan kontraktor melain mereka hanya pengelola yang melibatkan masyarakat.

2. Akses Masyarakat Terhadap Transparansi Anggaran

Dalam desa masyarakat sangat berperan penting berperan aktif dalam pelaksanaan dana desa namun hal ini di lihat bagaimana akses masyarakat terhadap

⁷³ Rustam, Kepala Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

transparansi anggaran yang akan di gunakan dan yang telah di gunakan hal ini sangat penting bagi masyarakat.

“Rustam Sali mengatakan bahwa masalah keterbukaan masyarakat bukan lagi terbuka tapi kita sudah telanjang karna mulai dari perencanaannya penyusunannya sampai pelaksanaannya semua terbuka karna yang pertama memang ada yang namanya papan informasi inilah kegiatan kita laksanakan dengan anggaran sekian dengan volume sekian dengan panjang sekian di dusun ini yang kedua dalam setiap kegiatan fisik itu yang namanya prasasti disitu tujukkan dalam setiap pelaksanaan fisik terdapat papan proyek disitu katakanlah sekian anggarannya sekian panjangnya kemudian upah pekerja sekian kalau desa itu bukan lagi terbuka transparansi tapi sudah telanjang sesuai APBDES tidak ada itu APBD itu hanya papan proyek yang di musyawarah bahwa sekian intuisi yang kita kerjakan dan disampaikan kemasyarakat apakah memang sudah di terima itu”⁷⁴

Mendengar apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa masalah keterbukaan terhadap masyarakat itu bisa dikatakan sudah telanjang mengapa demikian karna mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan semua dilakukan secara terbuka karna untuk akses masyarakat yang pertama ada yang dinamakan papan informasi yang isinya kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dengan melihat anggaran dan volume, panjang dusun yang akan di bangun kemudian yang kedua ada yang dinamakan prasasti juga ada yang namanya papan proyek untuk kegiatan fisik yang sudah dilaksanakan dengan mencantumkan anggaran yang digunakan dan upah pekerja, hal inilah yang membuktikan bahwa dana yang di pakai sudah transparansi sesuai dengan APBDS dan APBD itu hanya sebuah papan proyek yang telah di musyawarahkan bahwa sekian antuisi yang telah dikerjakan lalu disampaikan kemasyarakat apakah memang sudah betul-betul diterima hal inilah yang membuktikan bahwa akses masyarakat dalam mengetahui transparansi anggaran atau dana desa itu sangat mudah dengan beberapa bukti yang dilaporkan oleh aparat desa.

“Hamdana mengatakan bahwa lihat ki ada papan di depan distukan semua sudah tercatat larinya ini kesini ini kesini terus pada saat pengerjaan fisik kan ada papan proyek distu semua tercatat itu disitu semua, papan di depan itukan papan transparansi makanya itu setiap desa pasti ada papan transparansinya seperi itu supaya masyarakat tau ini yang kita kerjakan ini-ini semua, sudah terpasang cuman masyarakat kurang membaca dan kurang perhatian, terus perhatikan ki coba lorong yang sudah di kerja desa ada papan proyeknya jadi disitu semua ada semua dananya di situ, sesuai dengan dana sesuai dengan

⁷⁴ Rustam, Kepala Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

dana yang ada di pelaporan jadi kita tidak bisa semerta-merta dan mengelak bahwa lain di situ, nah kita itu uang seperti posko pembangunan posko adakan dananya disitu tertulis jadi langsung memang keluar dananya sekian termasuk gajinya pekerja harga bahan sekian ada semua mi jadi kira-kira kenroi pole kenroi rekeng iyero aga-aga rekeng maksunya dibilang pekkoje carana na ada kelihatan, makanya saya bilang biasakan bilang sama orang itaki iyero anue kalau misalkan ada itu, tidak mungkin tu nde iyoki bawang mi iyero aga-gae makkada angka papan proyek sekedar kita tulis tidak harus sesuai dengan apa yang terpajang di depan apa juga yang akan kami laporkan sesuai semuanya degaga lesse.⁷⁵

Artinya :

“Hamdana coba lihat yang ada didepan, disitu semua sudah tercatat dana yang digunakan, pada pengerjaan fisik di siapkan yang namanya papan proyek semua sudah tercatat. Papan yang ada didepan dinamakan papan transparansi makanya di setiap desa pasti mempunyai papan transparansi seperti itu supaya masyarakat tau ini yang akan dikerjakan, semua papan sudah terpasang cuman masyarakat kurang membaca dan kurang memephrhatikan, coba kita perhatikan lorong sudah dikerjakan disitu sudah ada papan proyek dan semua dana yang digunakan sudah tercantum, dana yang digunakan sesuai dengan dana yang dilaporkan jadi kita tidak bisa semerta-merta dan mengelak bahwa beda. Seperti pembangunan posko dananya sudah tercantum makanya dana yang tertulis dananya langsung keluar sesuai dengan dana termasuk dengan gaji pekerja bahwa harga bahan sekian jasi semua sudah ada, kalau dipikir kira-kira dana itu dari mana maksudnya bagaimana caranya karna sudah kelihatan, makanya saya bilang keorang-orang bahwa coba kita lihat karna tidak mungkin hal-hal yang akan dilakukan cuman sekedar tulisan papan proyek, kita menulis sesuai dengan apa yang sudah terpajang didepan apa juga akan akan kami laporkan sesuai semuanya tidak ada sama sekali yang dialihkan”

⁷⁵ Hamdana, Staf Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

Mendengar dari apa yang di sampaikan narasumber mengatakan bahwa papan informasi sudah di siapkan, di papan informasi tersebut sudah tercantum apa-apa yang akan dilaksanakan, pada pengerjaa fisik ada yang dinamakan papan proyek dengan berisi semua anggaran yang digunakan. Pada setiap desa telah disiapkan papan transparansi agar masyarakat tau apa-apa yang akan dilaksanakan dan yang sudah dilaksanakan, setiap pembangunan sudah ada papan proyek akan tetapi masyarakat yang kurang memperhatikan hal tersebut. hal ini dibuktikan pada setiap jalan-jalan desa yang sudah dibangun terpasang papan proyek yang berisikan dana-dana yang telah digunakan pada pembangunan tersebut. jadi pada pelaporan aparat desa tidak semerta-merta dalam membuat laporan keuangn. Ketika adanya pembangun seperti pembangunan posko dana yang dikeluarkan semua sudah tercantum dengan gaji pekerja. Hal ini disampaikan kemasyarakat agar mereka lebih banyak memperhatikan papan yang sudah terpasang karna papan tersebut bukan hanya sekedar tulisan, sebagai aparat desa sudah melakukan tugasnya dengan baik karna telah melaporkan segala sesuatu yang sudah dilaksanakan.

“Herman mengatakan bahwa jelas adanya papan transparansi ini yang dilaksanakan tahun ini sudah jelas ini yang terlaksana papan transparansi atau papan informasinya selama ini masyarakat yang berpartisipasi dalam hal ini dana desa semua pekerjaannya semua orang di sini kita pake setiap ada kegiatan desa masyarakat selalu dilibatkan dalam msalah pembangunan masyarakt ji semua yang kerjakan bukan dari luar”⁷⁶

Dari apa yang di sampaikan narasumber bahwa jelas adanya akses masyarakat dengan adanya papan informasi atau papan transparansi bahwa kegiatan-kegiatan yang akan dilaksnakan untuk tahun ini dan tahun berjalan, apalagi selama ini masyarakatlah yang selalu ikut handil dalam hal pembangunan masyarakat selalu berpartisipasi dalam pekerjaan desa, hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat memiliki banyak akses untuk mengetahui transparansi dana desa dan banyak hal

⁷⁶ Herman, Sekretaris Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

yang bisa dilihat masyarakat dalam hal ketransparansian dana dan desa dengan adanya papan proyek atau papan informasi.

“Hanida mengatakan bahwa alhamdulillah itu sudah bagus karna adanya pembangunan sudah dilihat mi banyak sekali bangunan, buktinya sudah banyak kalau saya dana desanya buktinya ini hee jalanan inikan dana desa semua ini dan kalau data saya tidak pernah liat tapi kalau masalah pekerjaan sudah nyata begitu, kalau masalah bangunannya akan ada tapi kalau data dananya saya tidak pernah liat sebagai masyarakat biasa saya tidak tau itu tapi jelas sudah adami dilihat”⁷⁷

Mendegar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa dalam hal akses sudah bagus karnanya adanya bukti pembangunan yang dapat dilihat dari masyarakat, banyaknya bangunan sudah menjadi akses bagi mereka mengetahui tentang transparansi dana desa itu sendiri, akan tetapi apa yang disampaikan bahwa dalam hal data iya belum pernah melihat secara bukti namun berbicara masalah bukti fisik sudah banyak sekali bangunan yang di lihat. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tanpa data tetapi adanya bukti fisik itu sudah menjadi pandangan akses bagi masyarakat dalam mengetahui transparansi dana desa.

“Mardiana mengatakan bahwa akses yang sudah ada karna kelihatanmi pembangunanya.”⁷⁸

Mendegar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa sudah adanya akses untuk mengetahui transparansi dana desa dengan melihat bangunan-bangunan. Karna masyarakat menggap bahwa adanya transparansi itu dilihat dari apa yang sudah dibangun oleh desan itu sendiri kebutuhan yang meraka harapkan selama ini terealisasikan, masyarakat berfikir bahwa tanpa adanya data tapi adanya bukti fisik sudah membuktikan bahwa desa itu sudah transparan akses masyarakat dalam melihat transparansi memang harus adanya bukti fisik yang mereka lihat.

⁷⁷ Hanida, Masyarakat Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

⁷⁸ Mardiana, Masyarakat Desa Mattito Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

“Rahman mengatawan bahwa akses ta itu makanja bangunan na bagus kalau masalah pembangunannya karna desa-desa kemarin itu tidak bagus sekarang sudah banyak pembangunannya yang jadi kita bersyukur karna bangunannya itu yang banyak jadi bersyukur karna dekkadana seddimi dua tallu mi rekeng na bangun yang kedua banyaknya mattiro ade itu dia bisa bangun semuakan dan melihat desa-desa lain itu saya rasa nde nulle alena makkoro jadi serasa desa sekarang kita sudah liat buktinyakan terbukti banyak sudah bangunan yang ada mulai dari puskesmas kantor desanya itulah suatu kelebihan dia jadi kepala desa karna dulu-dulu itu tidak seperti itu apalagi jalanan lorong-lorong itu banyak sudah dia bikin bahkan jalan tani sudah agak bagus semua yang dulukan tidak ada begitu nanti dia kepala desa baru banyak jadi”⁷⁹

Mendegar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa dalam hal akses masyarakat sudah sangat bagus apalagi melihat dari apa yang disampaikan bahwa dalam hal pembangunan sudah sangat bagus karna desa sebelumnya tidak seperti saat ini hal ini menjadi pendukung bahwa bukti transparansi desa di buktikan melalui pekerjaan fisik karna rasa syukur dari masyarakat melihat desa yang sudah agak berkembang dengan melihat bangunan-bangun yang telah ada masyarakat menilai bahwa trasparansi dana desa hanya di lihat dari apa yang sudah di bangun sesuai dengan kebutuhan masyarakat jadi hal ini dapat disimpulkan bahwa meskipun tanpa data yang masyarakat dapat lihat akan tetap bukti fisik yang menjadi tolok ukur pertama dalam hal melihat akses transparansi itu sendiri.

“Muhammad Ali mengatakan bahwa bagus pelayanannya bagus cepat semua ada mau di urus cepat kantornya tidak pernah kosong sesuai jadwal jamnya dan melihat dana desa saya lihat bagus-bagus sangat bagus karna tabangun semua , kalau dia desa mattiro ade sudah trasparansi karna bangunannya sudah kelihatan tidak bisa tidak kelihtan karna merata semua jadi saya tidak pernah keluhkan masalah dana desa karna kepala desa bagus dia kerjakan apa yang disuruhkan apalagi hal akses ta”⁸⁰

Mendegar dari apa yang di sampaikan narasumber bahwa dalam hal pelayanan dilakukan dengan baik karna setiap ada pengurusan berkas tidak pernah kesulitan, karna jadwal yang disusun secara baik sehingga kantor tidak pernah kosong setiap

⁷⁹ Rahman, Masyarakat Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

⁸⁰ Muhammad Ali, Masyarakat Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

ada pengurusan, kemudian dalam pembangunan dilaksanakan dengan baik, di desa mattiro ade sudah bisa dikatakan transparansi mengapa demikian karna bukti pembangunan yang sudah banyak dan merata, masyarakat mengatakan bahwa tidak ada lagi yang perlu di keluhkan karna dana desa sudah transparansi, kemudian dalam akses tidak ada masalah, hal ini dibuktikan karna kepala desa dalam menjalankan tugas sudah baik dan sesuai dengan apa yang di inginkanoleh masyarakat.

“Darwis mengatakan bahwa akses masyarakat yah itu infrastruktur karna itu yang mempercepat akses masyarakat kedaerah misalnya sengae sudah ada akses kesempatan yang adanya pembangunan itu”⁸¹

Mendegar dari apa yang disampaikan bahwa akses masyarakat bisa dilihat dari infrastruktur yang sudah dibangun, karna dengan adanya infrastruktur itu lebih mempercepat akses masyarakat untuk mengetahui dana desa bahwa ternyata dana desa dipakai dengan baik dan benar karna memang betul-betul diperuntukkan untuk pembangunan dan kegiatan desa, seperti saat ini akses pembangunan yang bisa di lihat masyarakat setempat bahwa dusun sengae sudah memiliki jalan untuk tembus kedusun sempang barat hal inilah yang membuktikan bahwa akses masyarakat dalam melihat transparansi itu sudah mudah dengan adanya infrastruktur yang disiapkan.

3. Audit Independan dan Efektif

Dalam hal keuangan pasti ada yang namanya pemeriksaan dari pusat apalagi menyangkut masalah anggaran pengauditan sangat penting dalam hal keuangan karna ditakutkan adanya manipulasi data atau dana yang dipakai maka sangat penting adanya pengaudit dan harus di lakukan secara efektif agar tidak terjadi manipulasi data.

“Rustam Sali mengatakan bahwa di desa itu sendiri tidak ada yang mengaudit staf karna yang ada hanya bendahara dan yang mengaudit adalah inspektorat dengan, dan ada yang namanya inspektorat kalau di tingkat kabupaten kalau

⁸¹ Darwis, Masyarakat Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus 2021)

tingkat provinsi ada BPK dan BPKP dan bahkan saya pernah di audit inspektorat provinsi jadi masalah auditnya setiap kegiatan itu diperiksa kita setiap empat bulan kita diperiksa kita diaudit berapa besar dana yang keluar apakah ada silpa atau bagaimana di kemanakan silpa dan ini dilakukan secara efisien perempat bulan.⁸²

Mendengar dari apa yang di sampaikan narasumber bahwa dalam hal pengauditan laporan keuangan tidak ada sama sekali orang yang atau staf yang mengaudit meskipun dalam hal ini ada bendahara yang mengatur keuangan, karna yang mengaudit laporan keuangan hanya inspektorat yang terkhusus di tingkat kabupaten sedangkan pada tingkat provinsi yang memeriksa adalah BPK dan BPKP, dan bahkan terkhusus desa mattiro ade laporan keuangan diperiksa oleh inspektorat provinsi, narasumber juga mengatakan bahwa masalah pengauditan di lakukan di setiap kegiatan yang dilakukan, dengan melihat berapa banyak jumlah dana yang terpakai dan dilaporkan apakah ada silpa ataukah silpa dibawah pada tempat lain, dalam hal sebenarnya tidak dikatan sebagai pengauditan indepen akan tetapi dinamakan sebagai indendensial dimana dilakukan scara langsung oleh audit internal inspektora namun hal ini dilakukan dengan efektif perempat bulan sekali.

“Herman mengatakan bahwa auditnya itu dari inspektorat turun langsung”⁸³

Mendengar dari apa yang disampaikan bahwa pengauditan dilakukan secara independen dalam hal inspektorat turun untuk memeriksa laporan keuangan kegiatan- kegiatan yang sudah dilaksanakan dengan meilhat beberapa bukti, hal ini juga dilakukan agar tidak terjadi manipulasi data pada dana desa, hal ini juga dilakukan agar aparat desa lebih teliti dalam hal pelaporan keuangan dan tidak menerka-nerka dalam memasukkan data karna hal ini jika dilakukan tidak akan berdampak pada desa dan mengakibatkan dana yang disalurkan dapat berkurang, megapa demikian jika laporan keuangan dilakukan dengan baik dan efektif maka akan ada poin plus untuk

⁸² Rustam, Kepala Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus).

⁸³ Herman, Sekretaris Desa Mattiro Ade'(Wawamcara Tanggal 19 Agustus).

desa itu sendiri menga[pa demikian karna kemungkinan besar akan bertambah dana jika pelaporan dilakukan secara baik dan benar juga efektif.

4. Keterlibatan Masyarakat Dalam Pembuatan keputusan Anggaran

“Herman mengatakan Bahwa selama ini yang berpartisipasi dalam hal ini dana desa semua pekerjaannya semua orang disini kita pakai, masalah pembangunanya masyarakat disini semua ji kita pake dan tidak ada orang dari luar”⁸⁴

Mendegar dari apa yang disampaikan bahwa selama ini masyarakat selalu dilibatkan dalam hal dana desa, masyarakat selalu berpartisipasi dalam hal dana desa mengapa demikian karna semua pekerjaannya yang ada di dalam desa masyarakat selalu turun handil dalam hal pembangunan maupun kegiatan-kegiatan lainnya yang menyangkut desa, aparat desa tidak pernah mengambil keputusan jika tidak ada masyarakat apalagi dalam hal gotong royong untuk pembangunan yang ada di dalam desa yang menjadi pekerja masyarakat itu desa kitu sendiri tanpa harus mengambil bantuan dari masyarakat lain, hal ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat memilikin peran utama dalam hal pengambilan keputusan.

“Yedi mengatakan bahwa kalau masalah dana itu dek saya tidak tau tapinkalau masalah kegiatan saya tau apa-apa yang di usulkan apa-apa yang mau dibangun dan terkain masalah dana saya tidak tau”⁸⁵

Mendegar dari apa yang disampaikan narasumber bahwa masalah keterkaiatan dalam hal keputusan dana tidak pernah turun handil dalam hal itu akan tetapi pada saat pembahasan untuk kegiatan-kegiatan barulah turun dalam hal mengambil keputusan mengapa demikian karna beliaulah yang mengumpulkan semua usulan-usalan yang ada dan apa-apa kegiatan yang akan dilaksanakan namun jika sudah memasuki rana anggaran beliaun sudah tidak tau tentang hal tersebut beliau tidak turun handil dalam tersebut. jadi apat disimpulkan bahwa dalam hal anggaran masih kurang keterlibatan.

⁸⁴ Herman, Sekretaris Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

⁸⁵ Yedi, Masyarakat Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus).

“Rusdi mengatakan bahwa ndena pada biasa makkada iyakan biasa okkoka BPD tapi ndena na sekarang apa massunaka pole BPD cuman makkoro rekeng kita rapat dulu berapa yang dikelola di desa ini di dusun ini tapi makanja sebenar na apa rata mua cuman makkoro makkada pembangunan sama tapi dana tidak sama karna pengeluaran di dusun ini banyak dengan luas dusun karn sama halnya sempangkan terlalu luas jadi tidak boleh terlalu ini harus dibagi dua dusun”⁸⁶

Artinya:

Rusdi mengatakan bahwa semua sudah tidak sama dulu karna saya dulu menjabat di BPD tapi sekarang sudah tidak saya sekarang sudah keluar cuman seperti itu kita rapatkan dulu berapa yang dikelola di desa dan di setiap dusun tapi sebenarnya sudah bagus dan semua sudah merata cuman seperti itu pembangunan tetap sama namun dana yang tidak sma karna ada dusun yang memang luas seperti halnya sempang barat terlalu luas jadi tidak boleh terlalu banyak karna dana yang digunakan dibagi dua.

Mendegar dari apa yang disampaikan bahwa semua memang sudah tidak sama dengan yang dulu karna beliau pernah menjabat di BPD namun sekarang sudah tidak tetapi dijelaskan bahwa sebelumnya itu memang harus di adakan rapat untuk melihat apa-apa yang akan dikelola di setiap dusun, hal ini memang dikatan sudah merata akan tetapi pembangunan tetap sama namun dana yang digunakan tidak bisa sama, karna dalam 4 dusun yang ada semua memiliki luas yang berbeda dengan volume yang berbeda hal ini yang menyebabkan dana yang dikeluarkan setiap dusun itu berbeda namun pada pembangunan setiap dusun tetap dapat dalam hal pembangunan sama halnya pada dusun Sempang barat yang dananya harus dibagi dua karna di dalam terdapat dua dusun.

“Darwis mengatakan bahwa kalau kebetulan tidak ada kesibukan saya sebagai anggota BPD hadir mengikuti perkembangan yang ada di desa terkait masalah anggaran itu juga kita pantau karna memang tanggungjawab kita disitu sebagai BPD yah mitra kepala desa pasti kita pantau pelaksanaan pembangunan yang ada di desa”⁸⁷

Mendegar dari adaa yang di sampaikan narasumber bahwa ia selalu ikut atau terlibat dalam hal penyusunan anggaran dana desa akan tetapi tidak setiap yang di

⁸⁶ Rusdi, Masyarakat Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustus)

⁸⁷ Darwis, Masyarakat Desa Mattiro Ade'(Wawancara Tanggal 19 Agustsus)

ikut karna terkadang adanya kesibukan, dan sebaga anggota BPD memang sudah menjadi tanggungjawab mengikuti atau terlibat dalam hal menyusun anggaran, selalu anggota BPD juga memiliki tanggungjawab untuk selalu mengikuti perkembangan yang ada di desa apalagi menyangkut masalah anggaran, anggota BPD sebagai mitra kepala desa yang tugasnya selalu mengawasi pelaksanaana pembangunanatau kegiatan-kegiatan yang ada di desa.

6. Pernayaan Satandar Akuntansi Keuangan

Tabel 4.5 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1	Pendapatan Transfer	1.149.434.000,00	459.773.600,00	689.660.400,00
4.2.1	Dana Desa	1.149.434.000,00	459.773.600,00	689.660.400,00
	Jumlah Pendapatan	1.149.434.000,00	459.773.600,00	689.660.400,00
5	Belanja			
01	Bidang penyelenggaraan pemerintahan Daerah	62.409.200,00	43.409.200,00	19.000.000,00
01.04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, keuangan dan pelaksanaan	62.409.200,00	43.409.200,00	19.000.000,00
01.04.08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	62.409.200,00	43.409.200,00	19.000.000,00
5.2	Belanja Barang dan jasa	36.409.200,00	36.409.200,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	28.909.200,00	28.909.200,00	0,00
5.2.3	Belanja perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.3	Belanja Modal	26.000.000,00	7.000.000,00	19.000.000,00
5.3.2	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Belanja	26.000.000,00	7.000.000,00	19.000.000,00
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	297.622.380,00	74.400.000,00	223.222.380,00

02.01	Sub Bidang Pendidikan	20.400.000,00	6,800,000,00	13,600,000,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	144.917.400,00	67.000.000,00	77.317.400,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.304.980,00	0,00	132.304.980,00
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	48.221.320,00	39.772.650,00	8.448.670,00
03.01	Sub Bidang Ketentraman, ketertiban, dan perlindungan	48.221.320,00	39.772.650,00	8.448.670,00
04	Bidang Pemberdayaan Masyarakat	68.281.000,00	0,00	68,281.000,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Perangkat desa	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
04.04.	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak	16.877,00,00	0,00	16.877,00,00
04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	16.404.000,00	0,00	16.404.000,00
05	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak	525.600.000,00	219.000.000,00	306.600.000,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	525.600.000,00	219.000.000,00	306.600.000,00
	Jumlag Belanja	1.002.133.900,00	376.581.850,00	625,552.050,00
	Surplus/ (Defisit)	147.300.100,00	83,191.750,00	64,108.350,00
6	Pembiayaan			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	2.699.900,00	2.699.900,00	0,00
Sumber Dana , DDS Dana Desa (APBN)				
KOD E REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5
6.1.1	Silpa Tahun Sebelumnya	2.699.900,00	2.699.900,00	0,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,0015 0.000.000,00	0,00	150.000.000,00

	Pembiayaan Nettc	(147.300.100,00	2.699.900,00	(150.000.000,00)
	Sisa Lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	0,00	85.891.650,00	85.891.650,00

Melihat dari tabel yang ada di atas bahwa laporan realisasi anggaran dilakukan secara baik dan terperinci mulai dari belanja dana yang dirincikan sampai dengan belanja barang konsumsi dilanjutkan dengan bidang pelaksanaan pembangunan desa dimana dicantumkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh pembangun desa mulai dari bidang pendidikan, kesehatan sampai dengan penyelenggaraan informasi publik, kemudian melihat dari bidang penanggulangan bencana rincian yang dicantumkan sangat terperinci karna dilakukan dengan baik sampai bidang yang mendesakpun dipersiapkan dengan baik agar semua dana yang terpakai jelas bahwa dana yang dikeluarkan betul-betul diperuntukan untuk sesuatu yang sudah direncanakan sebelumnya mengapa demikian agar adanya ketransparansian dana desa.

Tabel 4.6 : Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran 2021

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH (KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
2	Pendapatan			
4.2	Pendapatan Transfer	853.472.000,00	853.472.000,00	0,00
4.2.1	Dana Desa	853.472.000,00	853.472.000,00	0,00
	Jumlah Pendapatan	853.472.000,00	853.472.000,00	0,00
5	Belanja			
01	Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	9.930.000.000	8.230.00,00	1.700.000,00
01.03	Pengelolaan Administrasi kependudukan , pencatatan sipil	0,00	0,00	0,00
01.03.02	Penyusunan, pendapatan, dan pmutakhiran pfsil des	0,00	0,00	0,00
5.2	Belanja Barang dan jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.2	Belanja jasa Honorium	0,00	0,00	0,00

01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, perencanaan	9.930.000,00	8.230.000,00	1.700.000,00
01.04.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/pembal	5.700.000,00	4.000.000,00	1.700.000,00
01.04.02	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (musdus, rembang)	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00
02	Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	630.062.200,00	630.062.200,00	999.990,00
02.01	Sub Bidang pendidikan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	62.300.000,00	62.300.000,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	544.362.200,00	544.362.300,00	999.900,00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
03	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	0,00	0,00	0,00
03.03.	Sub Bidang Kepemudaan dan olahraga	0,00	0,00	0,00
05	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, Mendesak	261.100.000,00	261.100.000,00	0,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	251.100.000,00	251.100.000,00	0,00
	Jumlah Belanja	901.092.200,00	898.392.300,00	2.699.900,00
	Surplus/ (Defisit)	(47.620.200,00)	(44.920.300,00)	(2.699.900,00)
6	Pembiayaan			

6.1	Penerimaan Pembiayaan	47.620.200,00	47.620.200,00	0,00
6.1.1	Silpa Tahun Sebelumnya	47.620.200,00	47.620.200,00	0,00
Pembiayaan Nette		47.620.200,00	47.620.200,00	0,00
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH (KURANG)
1	2	3	4	5
	Sisa lebih (Kurang) Perhitungan Anggaran	0,00	2.699.900.00	2.699.900.00

Seperti yang kita lihat pada tabel yang ada di atas dapat kita simpulkan bahwa laporan realisasi anggaran yang telah di rencanakan semua terealisasikan mulai dari pendapatan sampai dengan perhitungan anggaran semua di catat dengan baik dan dana yang digunakan telah menyeluruh karna semua elemen-elemen telah mendapatkan dana untuk melaksanakan kegiatannya masing-masing, begitupun dengan dana silpa tahun lalu yang digunakan, akan tetapi pada tahun 2020 banyak sekali yang belum terealisasikan seperti yang ada di tabel dikarenakan adanya covid-19 yang menjadi kendala tapi pada bidang kesehatan yang diperuntukkan telah terealisasikan begitupun pada bidang pendidikan, juga pada bidang penata ruangan telah terealisasikan, pada tahun 2020 se mua yang terealisasikan hal-hal mendesak di akibatkan adanya covid jadi bisa kita simpulkan bahwa dana desa yang digunakan telah terealisasikan dengan mencantukan laporan keuangan begitupun pada pencatatan dilakukan dengan baik dan dibuktikan dengan data-data yang ada. Data yang di perlihatkan sebagai bukti Transapantansi Manajemen yang sesuai dengan PSAK 101.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Bentuk manajemen Dana Desa Mattiro Ade sudah sesuai dengan Fungsi manajemen dilakukan dengan baik karna betul-betul melibatkan masyarakat mulai Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, sampai Pengevaluasaan masyarakat selalu dilibatkan.
2. Dalam Pelaksanaan Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Berdsarkan PSAK 101 dapat dikatakan Transparansi karna melihat dari awal masyarakat dilibatkan dalam perencanaan dana desa serta adanya pembangunan-pembangunan yang ada di desa seperti jalan, Puskesmas dan masih banyak pembangunan lainnya begitupun dengan bantu-bantuan yang diperuntukkan untuk masyarakat, serta adanya laporan pertanggung jawaban, pencatatan laporan keuangan sudah Sesuai dengan PSAK 101 akan tetapi pemerintah Desa Mattiro Ade belum tau akan hal ini karna mereka memiliki Buku pedoman tersendiri penyusunan laporan keuangan yang mengatur dari Kabupaten dinamakan PERBUK kemudian berkaca dari akuntansi syariah sudah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dalam pelaporan pertanggungjawaban yang baik dan adil.

B. Saran

1. Saran kepada pemerintah Desa
Pemerintah Desa Mattiro Ade telah transparansi dalam manajemen dana desa dengan cukup baik, Namun harusnya meningkatkan Transparansi Dengan menyiapkan media informasi yang mudah di akses oleh masyarakat seperti website dan media sosial sehingga masyarakat dapat mengetahui informasi yang ada di desa.
2. Saran kepada Masyarakat Desa Mattiro Ade
Partisipasi masyarakat sangat penting dalam mendukung pemerintahan desa dalam melakukan pengelolaan dana desa, maka diharapkan kepada masyarakat

selalu ikut handil dan tetap memperhatikan informasi-informasi yang ada di di Desa agar masyarakat tidak menjerka-nerka tentang transparansi Dana Desa. Pentingnya masyarakat selalu berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mencegah asumsi-asumsi warga desa tentang aparat desa apalagi dalam hal keuangan, pembangunan dan infrastruktur yang ada di desa.



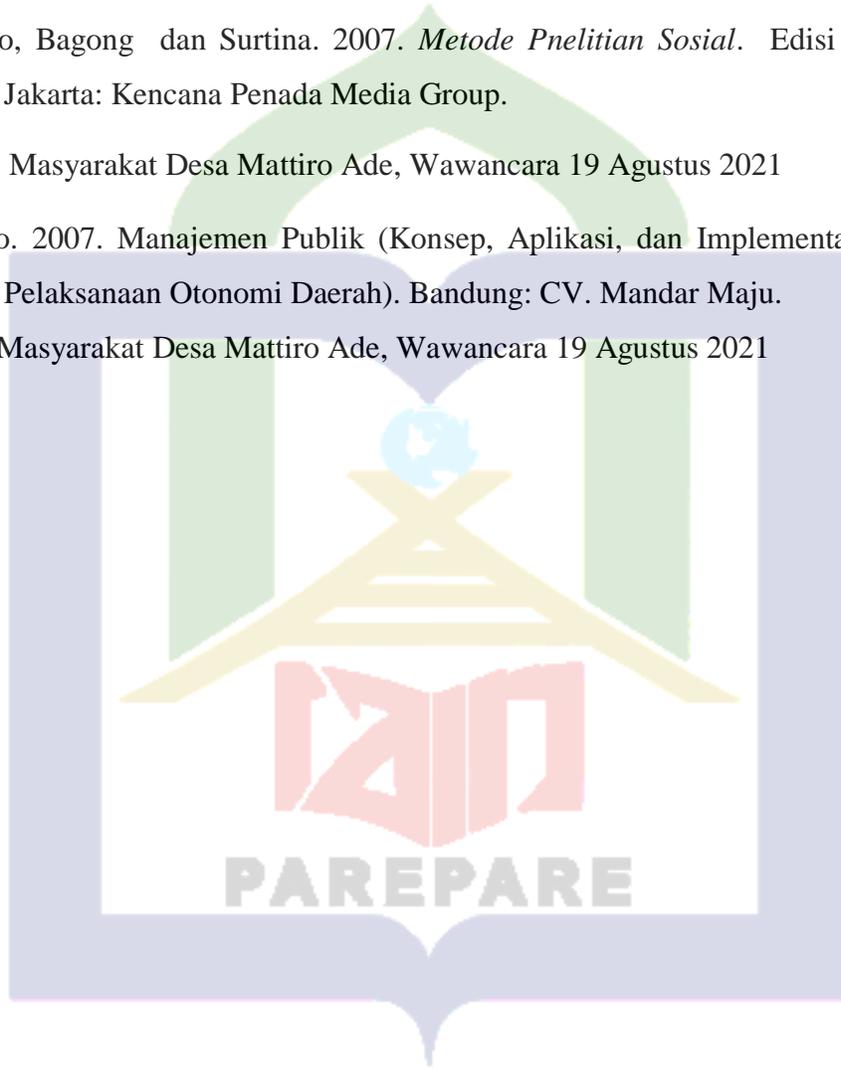
DAFTAR PUSTAKA

- Aditama, Roni Angger. *Pengantar manajemen*, Malang : AE publishing, 2020.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Sinar Grafiak, 2013.
- Anisah. 2018. *Analisis Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan pembangunan Desa Bawang Kecamatan Blado kabupaten batang tahun 2018 perspektif Ekonomi Islam*, (Skripsi Jurusan Ekonomi Syariah Prodi Ekonomi Bisnis dan Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan).
- Al-Qur'an Transliterasi dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Fadhilah Keutamaan Amal*. (Bandung: SYGMA,2012)
- Apriliani, Sherly Gresita. 2014. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Kedungrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi tahun 2013*.(Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Jember).
- Arista Widiyanti, *Akuntabilitas dan Transparansi Alokasi Dana Desa*, (Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri(UIN) Maluna Malik Ibrahim Malang), tahun 2017.
- Arif Cahyadi, Penerapan good governance dalam pelayanan public. *Jurnal penelitian administrasi public* (vol.2 No.2 oktober 2016) penerapan good governance dalam pelayanan (Studi Tentang Kualitas Pelayanan Elektronik Kartu Tanda Penduduk Berbasis Good) Governance Di Kecamatan Sukolilo Surabaya | Cahyadi | JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik (untag-sby.ac.id) (di akses pada 24 Februari 2021).
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Cet. II; Pustaka pelajar, 2000.
- Basrowi dan Suandi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Cet, I: Jakarta Reineka Cipta.

- Cahyadi, JPAP: *Jurnal Penelitian Administrasi Publik* (untag-sby.ac.id) (di akses pada 24 Februari 2021).
- Dwipayana, Adan E. Suntoro. 2003. *Membangun Good Governance di Desa*, Institute of Research and Empowerment, Yogyakarta.
- Darwis, sempang barat, masyarakat, wawancara 19 agustus 2021
- Hanifa, Suci Indah, 2015, *Akuntansi dan Transparansi Pertanggung Jawaban Anggaran belanja pendapatan riset akuntansi.vol.4.desa*, Jurnal ilmu dan
- Hanida, Sempang Barat, Masyarakat, Wawancara Agustus 2021.
- Hamdana. Staf Desa Mattiro Ade, Sempang Barat, Wawancara 19 Agustus 2021
- Hajrah,kanni, Bendaha desa mattiro ade, wawancara 19 agustus 2021.
- Herman, Sekretaris Desa Mattiro Ade, Sempang Sarat, Wawancara 19 Agustus 2021
- Ikhsan , Arfan. 2017. *Akuntansi Syariah*.Madenatera.
- Hanifa, Suci Indah, 2015, *Akuntansi dan Transparansi Pertanggung Jawaban Anggaran belanja pendapatan desa*, Jurnal ilmu dan riset akuntansi.vol.4.
- Irwan Taufiq Ritonga, *Mengukur transparansi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia: berbasis website*. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesi. (Desember 2016).196290-ID-mengukur-transparansi-pengelolaan-keuang.pdf (neliti.com).(Di akses 24 Februari 2021)
- Juliana trandiling, *Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Keuangan Sekolah Terhadap Motivasi Mengajar Guru Di Kabupaten Keerom*. Jurnal kajian ekonomi dan islam keuangan daerah(vol.4 No.2 Agustus 2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah terhadap sekolah terhadap motivasi mengajar guru di kabupaten keerom | Tandililing | KEUDA :Jurnal Kajian Ekonmi dan Keuangan (uncen.ac.id) (di akses 24 Februari 2021).
- Jumadi,masyarakat,sempang barat, wawancara 19 agustus 2021
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia.2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta.

- Kementrian Keuangan Republik Indonesia.2017 “*Buku Saku Dana Desa*”.Situs Resmi Kemenkeu.<https://www.kemenkeu.go.id/media/6750/buku-saku-dana-desa.pdf>.
- Kementrian Agama RI.2012. *Al-Qur’an Transliterasi dan Terjemahannya Dilengkapi dengan Fadhilah Keutamaan Amal*. Bandung.
- Mariati. Staf Desa Mattiro Ade, Sempang Barat, Wawancara 19 Agustus 2021
- Nasir, Moh. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor, Penerbit Ghalia Indonesia.
- Nugroho. 2003. *Good Governance*. Mandar Maju. Bandung
- Republik Indonesia. 2004. *Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah*, Bab I Pasal I.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, Bab I Pasal I.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. 2019. Desa Mattiro ade Kecamatan Patampnua Kabupaten Pinrang.
- Ruslan, Rosadi. *Metode Penelitian: Relation & Komunikasi*. Cet. V; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. 2019. Desa Mattiro ade Kecamatan Patampnua Kabupaten Pinrang,
- Rustam Sali. Kepala Desa Mattiro Ade, Wawancara 19 Agustus 2021
- Rusdi,, Masyarakat Desa Mattiro Ade, Wawancara 19 agustus 2021
- Suandi, Basrowi. 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Jakarta: Rineka Indah.
- Subagyo, Joko. 2004. *Metode Penlitian Dalam Teori Dan Praktek*. Jakarta: PT Reineka Cipta.

- Sugiono. 2002. *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sutabri, Tata . 2012. *Analisi sSistem Informasi* . Yogyakarta: Cv. Andi Offset.
- Sutopo, H.B. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I; Surakarta: UNS Press.
- Suyanto, Bagong dan Surtina. 2007. *Metode Pnelitian Sosial*. Edisi III. Cet. III; Jakarta: Kencana Penada Media Group.
- Suardi. Masyarakat Desa Mattiro Ade, Wawancara 19 Agustus 2021
- Waluyo. 2007. *Manajemen Publik (Konsep, Aplikasi, dan Implementasinya dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah)*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Yedi., Masyarakat Desa Mattiro Ade, Wawancara 19 Agustus 2021







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.2455/In.39.8/PP.00.9/8/2021
Lampiran : -
Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Di
KABUPATEN PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : IRA MAYA SOPHA
Tempat/ Tgl. Lahir : SEMPANG BARAT, 15 FEBRUARI 1999
NIM : 17.2800.038
Fakultas/ Program Studi : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM/AKUNTANSI LEMBAGA
KEUANGAN SYARIAH
Semester : VIII (DELAPAN)
Alamat : SEMPANG BARAT, KEL. MATTIRO ADE, KEC.
PATAMPANUA, KAB. PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KABUPATEN PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :

TRANSPARANSI MANAJEMEN DANA DESA MATTIRO ADE KABUPATEN PINRANG
BERDASARKAN PSAK 101 (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Agustus sampai selesai.
Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

03 Agustus 2021

Dekan,



Hamdani Muhammad Kamal Zubair



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG
 Nomor : 503/0387/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2021

Tentang

REKOMENDASI PENELITIAN

Menimbang Bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 09-08-2021 atas nama IBA MAYA SOPHA, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat**
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959,
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002,
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007,
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009,
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014,
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014,
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014,
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016, dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019

- Memperhatikan**
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0666/W/T Teknis/DPMPTSP/08/2021, Tanggal : 09-08-2021
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0385/BA/PENELITIAN/DPMPTSP/08/2021, Tanggal : 09-08-2021

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 08 SOREANG
 3. Nama Peneliti : IBA MAYA SOPHA
 4. Jahan Penelitian : TRANSPARANSI MANAJEMEN DANA DESA MATIRO ADE KABUPATEN PINRANG BERDASARKAN PSAK 101 (ANALISIS AKUNTANSI SYARIAH)
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : PENGUBER DESA DAN MASYARAKAT DESA MATIRO ADE KEC. PATAMPANUA
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Patampania
- KEDUA** Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 09-02-2022.
- KETIGA** Peneliti wajib menaati dan melakukan ketertuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 5 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, apabila dikemudian hari terdapat keketiruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 10 Agustus 2021



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-





PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN PATAMPANUA
DESA MATTIRO ADE

Jln. Poros Pinrang Polman (Sengae Utara) No.52 Kode Pos 91252

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN
Nomor :327 /DMA/1X/2021

Yang bertanda Tangan dibawah ini :

Nama : **RUSTAN SALLS.Pdi**
Jabatan : Kepala Desa Mattiro Ade
Alamat : Sengae Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa yang beridentitas :

Nama : **IRA MAYA SOPHA**
Nim : 17.2800.038
Program Studi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Alamat : Sempang Barat

Telah Selesai melakukan Penelitian di Desa Mattiro Ade Kecamatan Patampanua kabupaten pinrang Selama 30 (Tiga Puluh) Hari, Terhitung Mulai Tanggal 19 Agustus sampai 19 September 2021 untuk memperoleh Data dalam rangka penyusunan Skripsi, Penelitian yang berjudul **TRANSPARANSI MENEJEMEN DANA DESA MATTIRO ADE KABUPATEN PINRANG BERDASARKAN PSAK 101.**

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Mattiro Ade, 22, September 2021

Kepala Desa Mattiro Ade



PAREPARE



NAMA MAHASISWA : IRA MAYA SOPHA
 NIM : 17.2800.038
 FAKULTAS : EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
 PRODI : AKUNTANSI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH
 JUDUL : TRANSPARANSI MANAJEMEN DANA DESA MATTIRO ADE KABUPATEN. PINRANG BERDASARKAN PSAK 101

PEDOMAN WAWANCARA

Wawancara Kepala Desa Dan jajaran Desa Mattiro Ade

1. Bagaimana perencanaan manajemen Dana Desa Mattiro Ade
2. Bagaimana penyusunan stuktural/ pengorganisasian Dana Desa Mattiro Ade
3. Bagaimana pelaksanaan Dana Desa Mattiro Ade
4. Bagaimana cara pengevaluasian Dana Desa Mattiro ade
5. Bagaimana keterbukaan Dana Desa Mattiro ade
6. Apakah ada kerangka kerja hukum Transparansi Dana Desa Mattiro Ade
7. Apakah masyarakat memiliki akses dalam transparansi atau anggaran Dana Desa

8. Apakah ada audit independen dan sudah efektif yang dilakukan pada Dana Desa Mattiro Ade
9. Apakah masyarakat memiliki keterlibatan dalam pembuatan keputusan anggaran Dana Desa Mattiro Ade
10. Apakah laporan realisasi anggaran menyajikan realisasi atas anggaran pendapatan dan biaya
11. Apakah laporan aktivitas menyajikan ikhtisar sumber berupa pendapatan dana lokasi berupayaa di kelola satu periode
12. Apakah laporan keuangan menggambarkan posisi keuangan
13. Laporan arus khas menyajikan informasi kas sehu bubgan dengan aktivitas pokok(rutin), aktivitas non pokok
14. Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran neraca dan laporan arus khas
15. Apakah dalam Dana Desa menggunakan prinsip-prinsip akuntansi syariah
16. Apakah dalam pertnggungjawaban Dana Desa dilakukan secara baik
17. Apakah dalam pemetaan Dana Desa sudah adil
18. Apakah dalam pelaporan transaksi-transaksi Dana Desa sudah benar dan adil

Wawancara Untuk Masyarakat Mattiro Ade

1. Apakah perencanaan yang ada di Desa sudah sesuai dengan harapan anda
2. Bagaimana pelaksanaan Dana Desa menurut anda
3. Apakah ada pengevaluasian Dana Desa
4. Bagaimana keterbukaan Dana Desa terhadap Masyarakat
5. Apakah Bapak/ Ibu turut handil dalam penyusunan anggaran Dana Desa
6. Apakah ada transparansi Dana Desa Kemasyarakat
7. Apakah Bapak/ Ibu memiliki keterlibatan dalam pembuatan keputusan anggaran Dana Desa

Parepare, 18 Agustus 2021

Mengetahui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

(Dr. Zainal Said, M.H.)

NIP. 19761118 200501 1 002

(An Ras Try Astuti, M.E.)

NIP. 19710208 200112 2 002

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : RUSTAM SALI
 Alamat : SENGRE SEUTAMU DESA MATIRO ADE
 Jenis Kelamin : Laki - Laki
 Pekerjaan : KEP DESA MATIRO ADE

Menerangkan Bahwa

Nama : Ira Maya Sopha
 NIM : 17.2800.038
 Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten.Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Agustus, 2021


 RUSTAM SALI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HERMAN
Alamat : SEMPANG BARAT
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : SELDES

Menerangkan Bahwa

Nama : Ira Maya Sopha
NIM : 17.2800.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten.Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 14 Agustus, 2021

IAIN
PAREPARE


.....HERMAN.....

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MARIATI, SH

Alamat : SENGAE SELATAN

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Pekerjaan : STAF

Menerangkan Bahwa

Nama : Ira Maya Sopha

NIM : 17.2800.038

Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten. Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 10 Agustus, 2021

IAIN
PAREPARE

Mariati, SH

MARIATI, SH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HAMDANAH
Alamat : SEMPANG BARAT
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : STAF DESA MATTIRO ADE

Menerangkan Bahwa

Nama : Ira Maya Sopha
NIM : 17.2800.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten.Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Agustus, 2021


.....
HAMDANAH

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HANIDA
Alamat : SEMPANG
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Pekerjaan : URT

Menerangkan Bahwa

Nama : Ira Maya Sopha
NIM : 17.2800.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten.Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 9 Agustus, 2021

IAIN
PAREPARE

HANIDA

HANIDA

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : YEDI
Alamat : SENGAE SELATAN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan Bahwa

Nama : Ira Maya Sopha
NIM : 17.2800.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
"Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten.Pinrang Berdasarkan PSAK 101
(Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 04 Agustus, 2021

IAIN
PAREPARE


.....
YEDI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : DARWIS
Alamat : SEMPAK BARAT
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan Bahwa

Nama : Ira Maya Sopha
NIM : 17.2800.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten.Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Agustus, 2021

IAIN
PAREPARE


DARWIS

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MUHAMMAD ALI
Alamat : SEMPANG BARAT
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : PETANI

Menerangkan Bahwa

Nama : Ira Maya Sopha
NIM : 17.2800.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten.Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 19 Agustus, 2021

IAIN
PAREPARE

MUHAMMAD ALI

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *ABD. RAHMAN*
Alamat : *SEMPANG BARU*
Jenis Kelamin : *LAKI-LAKI*
Pekerjaan : *TANI*

Menerangkan Bahwa

Nama : *Ira Maya Sopha*
NIM : *17.2800.038*
Pekerjaan : *Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.*

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
"Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten.Pinrang Berdasarkan PSAK 101
(Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Agustus, 2021

ABD. RAHMAN
.....
ABD. RAHMAN

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : SUALNI
Alamat : SEMPARANG BARAT
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI
Pekerjaan : Petani

Menerangkan Bahwa

Nama : Ira Maya Sopha
NIM : 17.2800.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten.Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 4 Agustus, 2021

IAIN
PAREPARE


.....
Sualni

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : *RUSDI*
Alamat : *SEMPATE BARAT*
Jenis Kelamin : *LAKI-LAKE*
Pekerjaan : *WIRASWASTA*

Menerangkan Bahwa

Nama : Ira Maya Sopha
NIM : 17.2800.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul
"Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten.Pinrang Berdasarkan PSAK 101
(Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Agustus, 2021

IAIN
PAREPARE

Rusdi
.....
Rusdi

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : MARDIYANA
Alamat : SENGGA SELATAN
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : IRT

Menerangkan Bahwa

Nama : Ira Maya Sopha
NIM : 17.2800.038
Pekerjaan : Mahasiswa Prodi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Parepare.

Benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka penyelesaian skripsi yang berjudul "Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)".

Demikian surat keterangan ini di berikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, Agustus, 2021



MARDIYANA

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA MATTIROADE TAHUN ANGGARAN 2020				
Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2020	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	853.472.000,00	853.472.000,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	853.472.000,00	853.472.000,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN	853.472.000,00	853.472.000,00	0,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	9.930.000,00	8.230.000,00	1.700.000,00
01.03	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil	0,00	0,00	0,00
01.03.02.	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (D	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	0,00	0,00	0,00
01.04	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan,	9.930.000,00	8.230.000,00	1.700.000,00
01.04.01.	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembal	5.700.000,00	4.000.000,00	1.700.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.700.000,00	4.000.000,00	1.700.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.700.000,00	4.000.000,00	1.700.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	450.000,00	450.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	5.250.000,00	3.550.000,00	1.700.000,00
01.04.02.	Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rer	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	4.230.000,00	4.230.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	630.062.200,00	629.062.300,00	999.900,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFc	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	20.400.000,00	20.400.000,00	0,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	62.300.000,00	62.300.000,00	0,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kts Bumil, L	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	62.000.000,00	62.000.000,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	54.000.000,00	54.000.000,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas</i>	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	8.000.000,00	8.000.000,00	0,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy	0,00	0,00	0,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	0,00	0,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	0,00	0,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	0,00	0,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	0,00	0,00	0,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	0,00	0,00	0,00
5.2.2.99.	Belanja Jasa Honorarium Lainnya	0,00	0,00	0,00
5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	0,00	0,00	0,00
5.2.4.01.	Belanja Jasa Sewa Bangunan/Gedung/Ruang	0,00	0,00	0,00
02.02.09.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Saran	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.7.	<i>Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas</i>	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	300.000,00	300.000,00	0,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	544.362.200,00	543.362.300,00	999.900,00
02.03.11.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalar	413.697.650,00	412.708.750,00	988.900,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	15.605.000,00	15.070.000,00	535.000,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.605.000,00	1.070.000,00	535.000,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.605.000,00	1.070.000,00	535.000,00
5.2.4.	<i>Belanja Jasa Sewa</i>	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5.2.4.02.	Belanja Jasa Sewa Peralatan/Perlengkapan	14.000.000,00	14.000.000,00	0,00
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	398.092.650,00	397.638.750,00	453.900,00
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	398.092.650,00	397.638.750,00	453.900,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	8.260.000,00	8.220.000,00	40.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	101.454.500,00	101.454.500,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	288.378.150,00	287.964.250,00	413.900,00
02.03.14.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan [130.664.550,00	130.653.550,00	11.000,00
5.2.	<i>Belanja Barang dan Jasa</i>	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00
5.3.	<i>Belanja Modal</i>	129.594.550,00	129.583.550,00	11.000,00
5.3.5.	<i>Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan</i>	129.594.550,00	129.583.550,00	11.000,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.696.200,00	2.685.200,00	11.000,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	60.159.500,00	60.159.500,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	66.738.850,00	66.738.850,00	0,00
02.04	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	0,00	0,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
02.04.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air B	0,00	0,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	0,00	0,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	0,00	0,00	0,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	0,00	0,00	0,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	0,00	0,00	0,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	0,00	0,00	0,00
02.06	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
02.06.02.	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Di	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	0,00	0,00	0,00
03.03	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	0,00	0,00	0,00
03.03.06.	Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tin	0,00	0,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	0,00	0,00	0,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	0,00	0,00	0,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	0,00	0,00	0,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	261.100.000,00	261.100.000,00	0,00
05.01	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
05.01.01.	Kegiatan Penanggulangan Bencana	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	251.100.000,00	251.100.000,00	0,00
05.03.01.	Penanganan Keadaan Mendesak	251.100.000,00	251.100.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	251.100.000,00	251.100.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	251.100.000,00	251.100.000,00	0,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	251.100.000,00	251.100.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	901.092.200,00	898.392.300,00	2.699.900,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	(47.620.200,00)	(44.920.300,00)	(2.699.900,00)
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	47.620.200,00	47.620.200,00	0,00
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	47.620.200,00	47.620.200,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	47.620.200,00	47.620.200,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2020		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	2.699.900,00	(2.699.900,00)

MATTIRO ADE, 27 Juli 2021

KEPALA DESA

RUSTAN SALI, S.PdI



LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PER SUMBERDANA PEMERINTAH DESA MATTIROADE TAHUN ANGGARAN 2021				
Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)			Realisasi s.d 31/12/2021	
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.2.	Pendapatan Transfer	1.149.434.000,00	459.773.600,00	689.660.400,00
4.2.1.	Dana Desa	1.149.434.000,00	459.773.600,00	689.660.400,00
	JUMLAH PENDAPATAN	1.149.434.000,00	459.773.600,00	689.660.400,00
5.	BELANJA			
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	62.409.200,00	43.409.200,00	19.000.000,00
01.04	Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pel	62.409.200,00	43.409.200,00	19.000.000,00
01.04.08.	Pengembangan Sistem Informasi Desa	62.409.200,00	43.409.200,00	19.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	36.409.200,00	36.409.200,00	0,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	28.909.200,00	28.909.200,00	0,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	815.000,00	815.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan	6.600.000,00	6.600.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	13.125.000,00	13.125.000,00	0,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
5.2.1.99.	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya	5.219.200,00	5.219.200,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	26.000.000,00	7.000.000,00	19.000.000,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Be	26.000.000,00	7.000.000,00	19.000.000,00
5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio	26.000.000,00	7.000.000,00	19.000.000,00
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	297.622.380,00	74.400.000,00	223.222.380,00
02.01	Sub Bidang Pendidikan	20.400.000,00	6.800.000,00	13.600.000,00
02.01.01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFc	20.400.000,00	6.800.000,00	13.600.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.400.000,00	6.800.000,00	13.600.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	20.400.000,00	6.800.000,00	13.600.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	20.400.000,00	6.800.000,00	13.600.000,00
02.02	Sub Bidang Kesehatan	144.917.400,00	67.600.000,00	77.317.400,00
02.02.02.	Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, L	73.899.900,00	22.400.000,00	51.499.900,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.899.900,00	22.400.000,00	51.499.900,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	55.200.000,00	18.400.000,00	36.800.000,00
5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa	55.200.000,00	18.400.000,00	36.800.000,00
5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Mas	18.699.900,00	4.000.000,00	14.699.900,00
5.2.7.01.	Belanja Bahan Perlengkapan untuk Diserahkan kepada M	18.699.900,00	4.000.000,00	14.699.900,00
02.02.03.	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy	18.872.500,00	0,00	18.872.500,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.872.500,00	0,00	18.872.500,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.432.500,00	0,00	7.432.500,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.932.500,00	0,00	2.932.500,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.700.000,00	0,00	2.700.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	11.440.000,00	0,00	11.440.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Te	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
02.02.04.	Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	52.145.000,00	45.200.000,00	6.945.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	52.145.000,00	45.200.000,00	6.945.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	49.400.000,00	45.200.000,00	4.200.000,00
5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Ke	41.000.000,00	41.000.000,00	0,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.745.000,00	0,00	2.745.000,00
02.03	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	132.304.980,00	0,00	132.304.980,00
02.03.12.	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalar	132.304.980,00	0,00	132.304.980,00
5.3.	Belanja Modal	132.304.980,00	0,00	132.304.980,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	132.304.980,00	0,00	132.304.980,00
5.3.5.01.	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan	2.688.780,00	0,00	2.688.780,00
5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	70.776.000,00	0,00	70.776.000,00
5.3.5.03.	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material	58.840.200,00	0,00	58.840.200,00
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	48.221.320,00	39.772.650,00	8.448.670,00
03.01	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindi	48.221.320,00	39.772.650,00	8.448.670,00
03.01.01.	Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa	39.772.650,00	39.772.650,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	39.772.650,00	39.772.650,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	39.772.650,00	39.772.650,00	0,00
5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelak	795.000,00	795.000,00	0,00
5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga	11.436.000,00	11.436.000,00	0,00
5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/	27.541.650,00	27.541.650,00	0,00
03.01.07.	Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masy. di Bid. Hu	8.448.670,00	0,00	8.448.670,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.448.670,00	0,00	8.448.670,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.978.670,00	0,00	2.978.670,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	1.248.670,00	0,00	1.248.670,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	575.000,00	0,00	575.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.155.000,00	0,00	1.155.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	5.470.000,00	0,00	5.470.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/	3.120.000,00	0,00	3.120.000,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Tr	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	68.281.000,00	0,00	68.281.000,00
04.03	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
04.03.02.	Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
5.2.3.02.	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
04.04	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anz	16.877.000,00	0,00	16.877.000,00
04.04.03.	Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difable (Penyandang	16.877.000,00	0,00	16.877.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.877.000,00	0,00	16.877.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	5.937.000,00	0,00	5.937.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	2.462.000,00	0,00	2.462.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.225.000,00	0,00	1.225.000,00
5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	10.940.000,00	0,00	10.940.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/T	6.240.000,00	0,00	6.240.000,00
5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Tr	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
04.06	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	16.404.000,00	0,00	16.404.000,00
04.06.02.	Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanak	16.404.000,00	0,00	16.404.000,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.404.000,00	0,00	16.404.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.179.000,00	0,00	2.179.000,00
5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	929.000,00	0,00	929.000,00
5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.150.000,00	0,00	2.150.000,00
5.2.2.01.	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/T	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00
5.2.4.	Belanja Jasa Sewa	12.075.000,00	0,00	12.075.000,00
5.2.4.99.	Belanja Jasa Sewa Lainnya	12.075.000,00	0,00	12.075.000,00
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN I	525.600.000,00	219.000.000,00	306.600.000,00
05.03	Sub Bidang Keadaan Mendesak	525.600.000,00	219.000.000,00	306.600.000,00
05.03.00.	Penanganan Keadaan Mendesak	525.600.000,00	219.000.000,00	306.600.000,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	525.600.000,00	219.000.000,00	306.600.000,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	525.600.000,00	219.000.000,00	306.600.000,00
5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	525.600.000,00	219.000.000,00	306.600.000,00
	JUMLAH BELANJA	1.002.133.900,00	376.581.850,00	625.552.050,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	147.300.100,00	83.191.750,00	64.108.350,00
6.	PEMBIAYAAN			
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	2.699.900,00	2.699.900,00	0,00

Sumberdana : DDS Dana Desa (APBN)		Realisasi s.d 31/12/2021		
KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	2.699.900,00	2.699.900,00	0,00
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	150.000.000,00	0,00	150.000.000,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(147.300.100,00)	2.699.900,00	(150.000.000,00)
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	0,00	85.891.650,00	(85.891.650,00)

Mattiro Ade, 27 Juli 2021

KEPALA DESA

RUSTAN SALI, S. PdI



**DAFTAR ISIAN RENCANA KEGIATAN (DIRK)
PENGUNAAN DANA DESA (DD) DESA MATTIRO ADE
TAHUN ANGGARAN 2020**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBDES	JUMLAH BIAYA (Rp)		
			TRIWULAN I (40%)	TRIWULAN II (40%)	TRIWULAN III (20%)
	A. BIDANG PENYELENGGARAAN			4.230.000	23.768.000
	Penyelenggaraan Musyawarah Penyusunan RKPDesa Tahun 2021	5.700.000	-	-	5.700.000
	Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Non-Reguler) Silpa Tahun 2019	4.230.000	-	4.230.000	-
	Penyusunan/Pendataan/Pemukiman/ Pemutakhiran Profil Desa(Profil Kependudukan dan Pontensi	18.068.000	-	-	18.068.000
	JUMLAH A	27.998.000	-	4.230.000	23.768.000
	B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
	Sub Bidang Pendidikan	20.400.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa (Honor,	20.400.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	Sub Bidang Kesehatan	97.580.000	18.000.000	21.777.600	57.802.400
	Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	35.280.000	-	-	35.280.000
	Bantuan Insentif Kader Posyandu	48.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	Bantuan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	6.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Pemberian Makanan Tambahan	8.000.000	-	3.777.600	4.222.400
	Pengadaan Tikar pertumbuhan	300.000	-	-	300.000
	Pembangunan/Rehabilitasi/Perbaikan/Perkerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	458.700.200	297.165.200	123.285.000	38.250.000

			01. Pembangunan Rabat Beton Di Dusun Sengae Selatan Lrg Carles 100 M	65.788.900	-	65.788.900	-
			02. Pembangunan Rabat Beton Di Dusun Sempang Timur Lrg Lapangan 130,40 M	136.704.100	136.704.100	-	-
			03. Pembangunan Rabat Beton Di Dusun Sengae Selatan Lrg Mushallah 66,20 M	56.847.600	-	56.847.600	-
			04. Pembangunan Rabat Beton Di Dusun Sengae Utara Lrg Ambo Upe 86,60 M	110.659.100	110.659.100	-	-
			05. Penimbunan Jalan Dusun Sengae Selatan Lrg Charles 13 M	366.000	-	366.000	-
			06. Penimbunan Jalan Dusun Sempang Barat Lrg Ambo Intang 33 M	6.391.000	6.391.000	-	-
			07. Penimbunan Jalan Dusun Sempang Timur Lrg Imam Selatan 41,80 M	7.823.000	-	-	7.823.000
			08. Penimbunan Jalan Dusun Sempang Timur Lrg H. Sarifuddin 100 M	7.290.000	-	-	7.290.000
			09. Penimbunan Jalan Dusun Sengae Selatan Lrg Mushallah 25 Meter	282.500	-	282.500	-
			Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Perkerasan Jalan Lingkungan Pemukiman/ Gang	11.468.500	-	-	11.468.500
			11. Penimbunan Jalan Dusun Sengae Utara Lrg Ambo Upe 86,60 M	14.048.000	14.048.000	-	-
			12. Penimbunan Jalan Dusun Sengae Selatan Lrg Melintang 50 Meter	11.668.500	-	-	11.668.500
			13. Penimbunan Jalan Dusun Sengae Selatan Lrg Larawi 95,70 meter Silfa Tahun 2019	7.657.000	7.657.000	-	-
			14. Penimbunan Jalan Dusun Sengae Selatan Lrg Lainting 150 Meter Silfa Tahun 2019	21.706.000	21.706.000	-	-

						Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	3.000.000	2.218.600	218.600	562.800
						01. Pembuatan Info Grafik APBDesa	1.500.000	1.500.000	-	-
						02. Pembuatan Info Grafik Laporan Realisasi APBDesa	1.500.000	718.600	218.600	562.800
						Jumlah B	880.451.929	392.811.929	345.711.600	141.928.400
						C. BIDANG PEMBINAAN MASYARAKAT MASYARAKAT	7.159.400			
						Belanja Bantuan Pemberdayaan Bidang Olahraga	7.159.400	-	-	7.159.400
						JUMLAH C	7.159.400			7.159.400
i.						JUMLAH A+B+C	915.609.329	392.811.929	349.941.600	172.855.800
ii.						Silpa DDS Tahun 2019	51.330.329	47.100.329	4.230.000	-
iii.							864.279.000	345.711.600	345.711.600	172.855.800

Kepala Desa Mattiro Ade

RUSTAN SALI, S. PdI

**DAFTAR ISI RENCANA KEGIATAN (DIRK)
PENGUNAAN DANA DESA MATTIRO ADE
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REKENING	URAIAN	ANGGARAN APBDES	JUMLAH BIAYA (Rp)		
			TRIWULAN I (40%)	TRIWULAN II (40%)	TRIWULAN III (20%)
	A. BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA				
	01. Pendataan Desa, Pemetaan Potensi Sumber Daya Pembangunan Pengembangan Teknologi Komunikasi, SGss dan Prodesket	62.409.200	62.409.200	-	-
	JUMLAH A	62.409.200	62.409.200	-	-
	B. BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN				
	Sub Bidang Pendidikan	20.400.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non formal Milik Desa (Honor,	20.400.000	6.800.000	6.800.000	6.800.000
	Sub Bidang Kesehatan	144.917.400	78.545.000	47.972.400	18.400.000
	01. Bantuan Insentif Kader Posyandu	48.000.000	16.000.000	16.000.000	16.000.000
	02. Bantuan Insentif Kader Pembangunan Manusia (KPM)	7.200.000	2.400.000	2.400.000	2.400.000
	03. Pemberian Makanan Tambahan	16.000.000	8.000.000	8.000.000	-
	04. Pemberian Makanan Tambahan dan Vitamin untuk penanganan	2.699.900	-	2.699.900	-
	05. Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (untuk Masy, Tenaga dan	18.872.500	-	18.872.500	-
	06. Edukasi dan Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan	52.145.000	52.145.000	-	-
	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani	132.304.980	-	132.304.980	-
	01. Pembangunan Jalan Tani (Talud Jalan) Dusun Sempang Barat 594.50 m	132.304.980	-	132.304.980	-
	Jumlah B	297.622.380	85.345.000	187.077.380	25.200.000

		C. BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN		39.772.650		
		01. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada Masyarakat di Bidang Hukum dan Pelindungan Masyarakat	8.448.670	-	8.448.670	-
		02. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa (pembangiman pos, pengawasan pelaksanaan jadwal ronda/patroli dll) **	39.772.650	39.772.650	-	-
		JUMLAH C	48.221.320	39.772.650	8.448.670	-
		D. BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT				
		01. Peningkatan kapasitas perangkat Desa	35.000.000		35.000.000	
		02. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	16.877.000		16.877.000	
		03. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yang dilaksanakan oleh Desa)	16.404.000		16.404.000	
		JUMLAH D	68.281.000	-	68.281.000	-
		E. BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA	525.600.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000
		Bantuan BLT Desa	525.600.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000
		JUMLAH E	525.600.000	175.200.000	175.200.000	175.200.000
		F. Pengeluaran Pembiayaan	150.000.000	150.000.000		
		Penyertaan Modal Desa	150.000.000	150.000.000		
		JUMLAH F	150.000.000	97.046.750	23.466.450	29.486.800
		JUMLAH A+B+C+D+E+F	1.152.133.900	459.773.600	462.473.500	229.886.800
		Silpa DDS Tahun 2020	2.699.900	-	2.699.900	-
			1.149.434.000	459.773.600	459.773.600	229.886.800

Kepala Desa Mattiro Ade

PAREPARE

RUSTAN SALI, S. PdI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

**BERITA ACARA
REVISI JUDUL SKRIPSI**

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam menyatakan bahwa Mahasiswa:

Nama : IRA MAYA SOPHA
N I M : 17.2800.038
Prodi : Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah

Menerangkan bahwa judul skripsi semula:

Transparansi Manajemen Pengelolaan Dana Desa Mattiro Ade Kab. Pinrang
Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)

Telah diganti dengan judul baru:

Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kab. Pinrang Berdasarkan
PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah)

dengan alasan / dasar:

*..karena manajemen dan pengelolaan akan hampir mirip (sama)
jadi...mencukupi salah satunya:*

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 11 Januari 2022

Pembimbing Utama

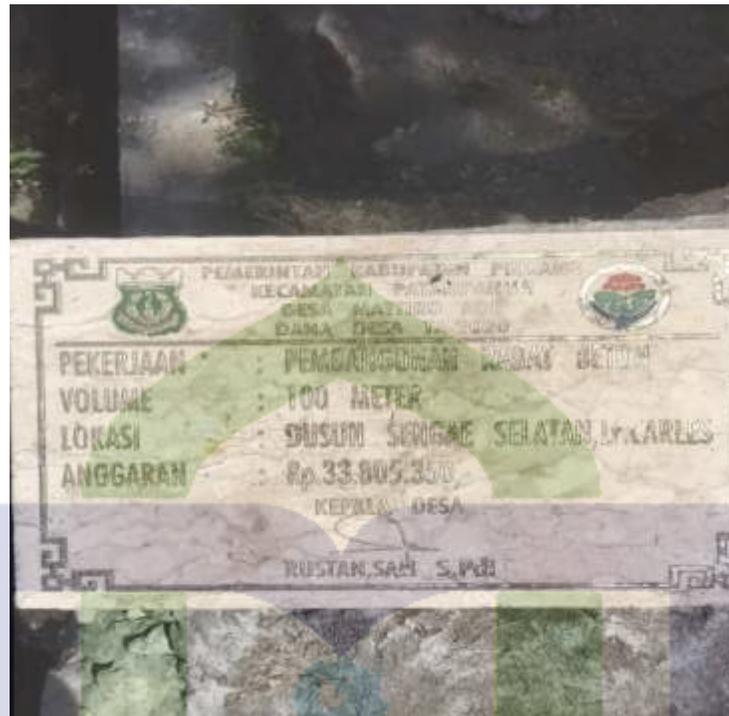
Pembimbing Pendamping

Dr. Zainal Said, M.H.

An Ras Try Astuti, M.E.

Dekan,

Muhammad Kamal Zubair



Gambar : 2.1 Papan Proyek Dana Desa



INFOGRAFIK APBDesa 2021 MATTIRO ADE
KECAMATAN PATAMPUNA, KABUPATEN PINRANG

A. Pendapatan Asli Desa Rp -
B. Pendapatan Transfer
 1. Dana Desa Rp 1.149.434.000
 2. Alokasi Dana Desa Rp 962.915.000
C. Pendapatan Lain Lain Rp -
JUMLAH PENDAPATAN Rp 2.112.349.000

JUMLAH BELANJA Rp 2.041.469.014
SURPLUS / DEFISIT Rp 90.879.986

REKAPITULASI PENDAPATAN

1. Pendapatan Asli Desa	0	2. Alokasi Dana Desa	962.915.000
3. Pendapatan Lain Lain	0	4. Dana Desa	1.149.434.000
Jumlah	0	Jumlah	2.112.349.000

REKAPITULASI BELANJA

1. Belanja Pegawai	1.100.000.000	4. Belanja Hibah	100.000.000
2. Belanja Operasional	500.000.000	5. Belanja Modal	100.000.000
3. Belanja Pemeliharaan	200.000.000	6. Belanja Lain Lain	141.469.014
Jumlah	1.800.000.000	Jumlah	2.041.469.014

SURPLUS / DEFISIT

Jumlah Pendapatan	2.112.349.000	Jumlah Belanja	2.041.469.014
SURPLUS / DEFISIT	90.879.986		

Gambar : 2.2 Papan Transparansi Tahun 2021



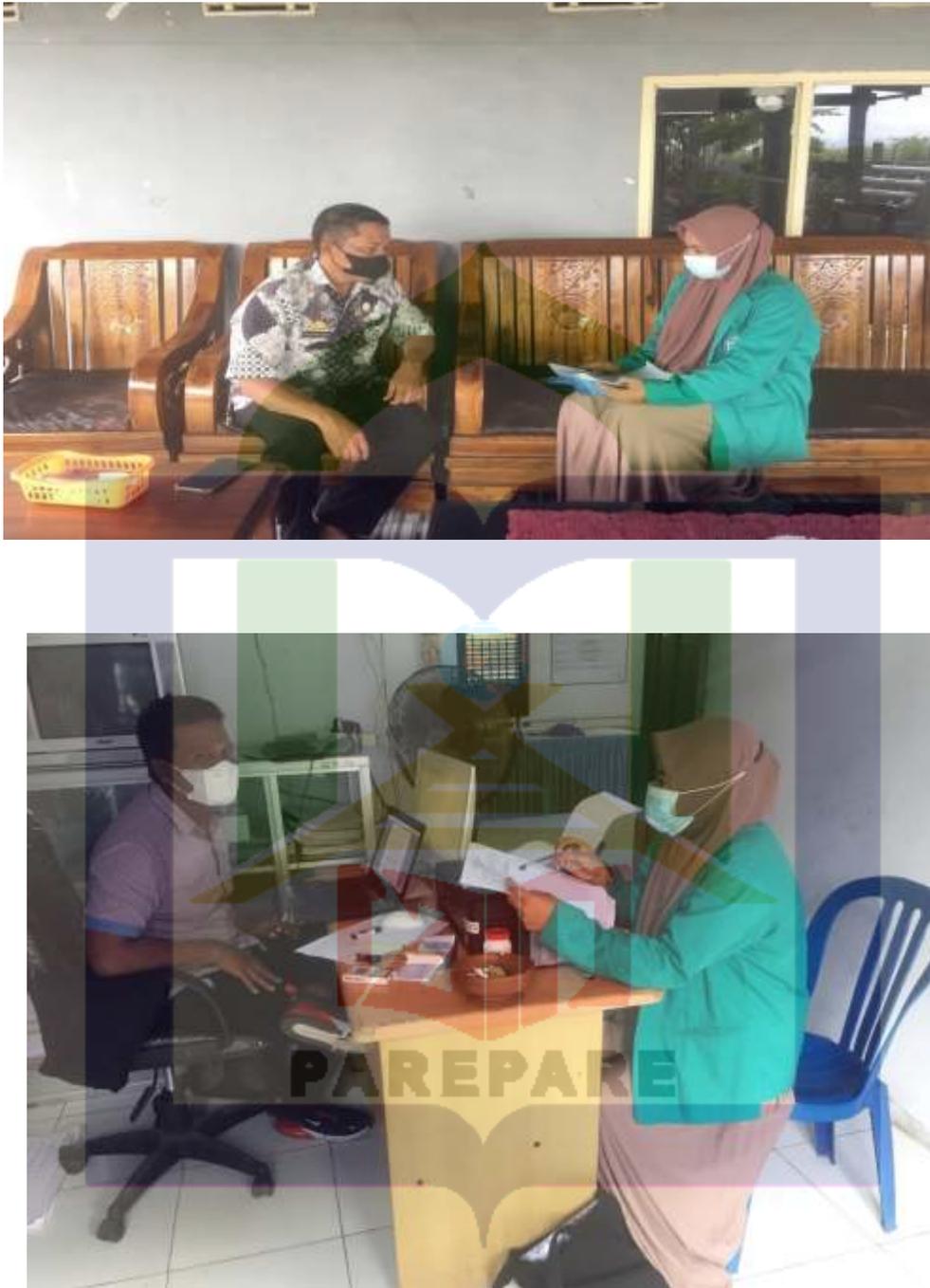
Gambar : 2.3 Papan Proyek(Papan Informasi)



Gambar : 2.5 Wawancara Masyarakat Desa Mattiro Ade



Gambar : 2.6 Wawancara Staf Desa Mattiro Ade



Gambar 2.7 Wawancara Kepala Dan Sekretaris Desa Mattiro Ade

BIODATA PENULIS



ira Maya Sopha lahir pada tanggal 15 Februari 1999 di Sempang Barat. Alamat Desa Mattiro Ade, Kecamatan Patampanua Kabupaten. Pinrang Sulawesi Selatan. Ayah bernama Suardi dan Ibu Jawaria anak keempat dari empat bersaudara. Adapun riwayat hidup pendidikan penulis yaitu tahun 2006 masuk SDN 126 Sempang Barat dan pada tahun 2011 masuk SMPN 1 Leppang selesai pada tahun 2014 kemudian melanjutkan jenjang pendidikan sekolah menengah di SMAN 1 Pinrang dan selesai pada tahun 2017, kemudian melanjutkan S1 di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Parepare (STAIN) yang kemudian beralih status menjadi Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) dengan mengambil program studi Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Penulis juga aktif di Organisasi kemahasiswaan seperti Lembaga Pers Mahasiswa Redline (Lpm Redline), Persatuan Mahasiswa Patampanua (PERMATA) Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Senat Mahasiswa Insitut Parepare (SEMA-I). Penulis melaksanakan pengabdian masyarakat di Kecamatan. Patampanua Kabupaten. Pinrang dan kemudian melaksanakan Praktik pengalaman lapangan di Kantor Pertanahan Kota Parepare, Penulis menyelesaikan studi dengan judul Skripsi , *Transparansi Manajemen Dana Desa Mattiro Ade Kabupaten. Pinrang Berdasarkan PSAK 101 (Analisis Akuntansi Syariah).*